



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



JL. BASUKI RAHMAT NO. 3 GEDUNG KANTOR A KANTOR GUBERNUR PERTAMA - NAIKOLAN KUPANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



DINAS PUPR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



pupr.nttprov.go.id



Dinas Pupr Prov. NTT



[pupr.ntt](https://www.facebook.com/pupr.ntt)



[pupr_ntt](https://www.tiktok.com/pupr_ntt)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, kami dapat merampungkan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja Dinas PUPR Provinsi NTT selama periode pelaporan. Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja, capaian, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur dan tata ruang di wilayah Provinsi NTT.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk peningkatan kinerja Dinas PUPR Provinsi NTT pada tahun-tahun mendatang.

Kupang, Februari 2026

 Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT,


Ir. Benyamin Nahak, MT
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710428 19903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
1.5 GAMBARAN UMUM DINAS PUPR PROVINSI NTT	9
1.6 KONDISI SARANA PRASARAN	18
1.7 ANGGARAN	19
1.8 ISU STRATEGIS	20
1.9 SISTEMATIKA LAKIP	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	25
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	25
2.2 VISI DAN MISI ORGANISASI	25
2.3 TUJUAN DAN SASARAN	26
2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
2.5 PROGRAM TAHUNAN	53
2.6 PERJANJIAN KINERJA	54
2.7 RENCANA ANGGARAN	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	61
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	62
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	62
3.3 ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI	66
3.4 REALISASI ANGGARAN	82
3.5 ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DITETAPKAN	83
BAB IV PENUTUP	85
LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1	
LAMPIRAN DOKUMENTASI & DATA DUKUNG	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini disajikan untuk menggambarkan capaian kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan program kegiatan selama 1 (satu) tahun berjalan.

Memperhatikan apa yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 dan untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan *Good Governance*, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan dari setiap dari setiap Perangkat Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya kepada public.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta melakukan penilaian kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran masih melekat pada RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 untuk mencapai Misi dan Visi Organisasi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPD Provinsi NTT, Indikator Kinerja Utama (IKU); Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Iktisar prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan. Indikator Kinerja Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan dengan capaiannya 11.817,260 M3 atau 91,08 %
- Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Irigasi dan Meningkatkan Produksi Panen. Indikator Kinerja Luas Areal Irigasi Fungsional dengan capaiannya 36.117,82 Ha atau 59,87 %

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat terhadap Air Minum Layak. Indikator Kinerja Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota dengan capaiannya 73,90 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi. Indikator Kinerja Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi dengan capaiannya 1.873,861 Km 69,73 %.

Sasaran 5 : Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan capaiannya 100 %.

Sasaran 6 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataaan Ruang dengan capaiannya 60,87 %

Pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.193.368.808.591.-- dengan rincian : Belanja Operasi sebesar Rp. 85.356.028.827,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 108.021.779.764,-

Secara rinci Belanja Modal untuk pembangunan Infrastruktur difokuskan pada pembiayaan untuk pembangunan Jalan ; Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum; Pembangunan Sumur Bor untuk mendukung ketersediaan Air Baku bagi Masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam perbaikan Kinerja di tahun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 kendala yang dihadapi antara lain :

- Adanya keterbatasan anggran sehingga capaian indikator belum terpenuhi secara keseluruhan.
- Adanya kejadian Bencana yang berdampak pada kerusakan sejumlah infrastruktur.
- Terdapat paket kegiatan yang tidak selesai sehingga sebagai luncuran.

Penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025 adalah sebesar 84,92 % (Rp. 164.213.053.952,00). Hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa permasalahan seperti termuat dalam item kendala diatas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama satu tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas PUPR memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum, jalan dan jembatan, sumber daya air, penataan ruang serta pertanahan. Pelaksanaan tugas ini menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata ruang wilayah yang tertata, aman, dan berkelanjutan.

LKIP ini disusun sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah tercapai, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur wilayah, Dinas PUPR Provinsi NTT berfungsi mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi: pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi, pengelolaan sumber daya air, penyediaan infrastruktur permukiman, perumahan rakyat serta penataan ruang wilayah dan pertanahan. Kinerja sektor ini berpengaruh langsung terhadap peningkatan aksesibilitas antar wilayah, pengembangan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik geografis yang unik dan menantang, dengan topografi bergunung dan kering. Kondisi ini menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi tidak merata dan memerlukan perencanaan yang matang serta pembiayaan yang besar. Tantangan utama yang dihadapi Dinas PUPR NTT antara lain:

- Keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah;
- Krisis air bersih dan irigasi, akibat musim kemarau panjang dan sumber daya air yang terbatas;
- Kerentanan terhadap bencana alam, seperti longsor, banjir bandang, dan abrasi pantai yang merusak infrastruktur;
- Keterpencilan antar pulau, yang menimbulkan biaya logistik tinggi dan keterlambatan pembangunan;
- Pertumbuhan sektor pariwisata yang menuntut peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi unggulan seperti Labuan Bajo, Alor, Sumba, dan Lembata.

Untuk mengukukur pencapaian karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sangat berdampak terhadap perkembangan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di semua sektor. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka mendukung Misi Pembangunan Provinsi, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini dengan masih menggunakan capaian dan ukuran target pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut: Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional, yaitu :
 - a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN'
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. RENSTRA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas publik;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menjadi pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja melalui siklus perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2025-2045;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- t. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas PUPR NTT)
- u. Dokumen RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, sebagai acuan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah Tahun 2025;
- v. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, sebagai dokumen kesepakatan antara Kepala Dinas PUPR dengan Gubernur NTT mengenai target kinerja yang harus dicapai selama tahun berjalan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan ini menjadi sarana untuk:

1. Menggambarkan secara menyeluruh realisasi kinerja yang telah dicapai di tahun 2025 dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen RPD Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026;
2. Menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR NTT;
3. Menjadi alat evaluasi dan pengendalian manajemen atas pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya;
5. Mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, berkelanjutan, dan terukur di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menilai capaian kinerja Dinas PUPR Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur di Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan ukuran target pada RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Indikator Kunci (IKU) dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas ;
2. Menyediakan dasar bagi evaluasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pada tahun-tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berdaya guna;
3. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik, sebagai wujud komitmen Dinas PUPR NTT dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang berorientasi pada hasil;
5. Memperkuat sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, sesuai yang tertuang dalam SAKIP;
6. Menyajikan informasi kinerja secara objektif dan terukur kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian PANRB sebagai bahan pembinaan, penilaian kinerja, serta dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas PUPR NTT) mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1.4.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas jabatan eselon II (Kepala Dinas) dan Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana terlampir (Struktur Organisasi).

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mandat yang diberikan kepada Daerah, pembagian urusan pemerintah konkuren Bidang Pekerjaan Umum terbagi ke dalam Urusan Pekerjaan Umum Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Rincian Pembagian Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari 11 urusan antara lain:
 - a. Sub Urusan Sumber Daya Air, Kewenangan Provinsi;
 - b. Sub Urusan Air Minum, kewenangan Provinsi;

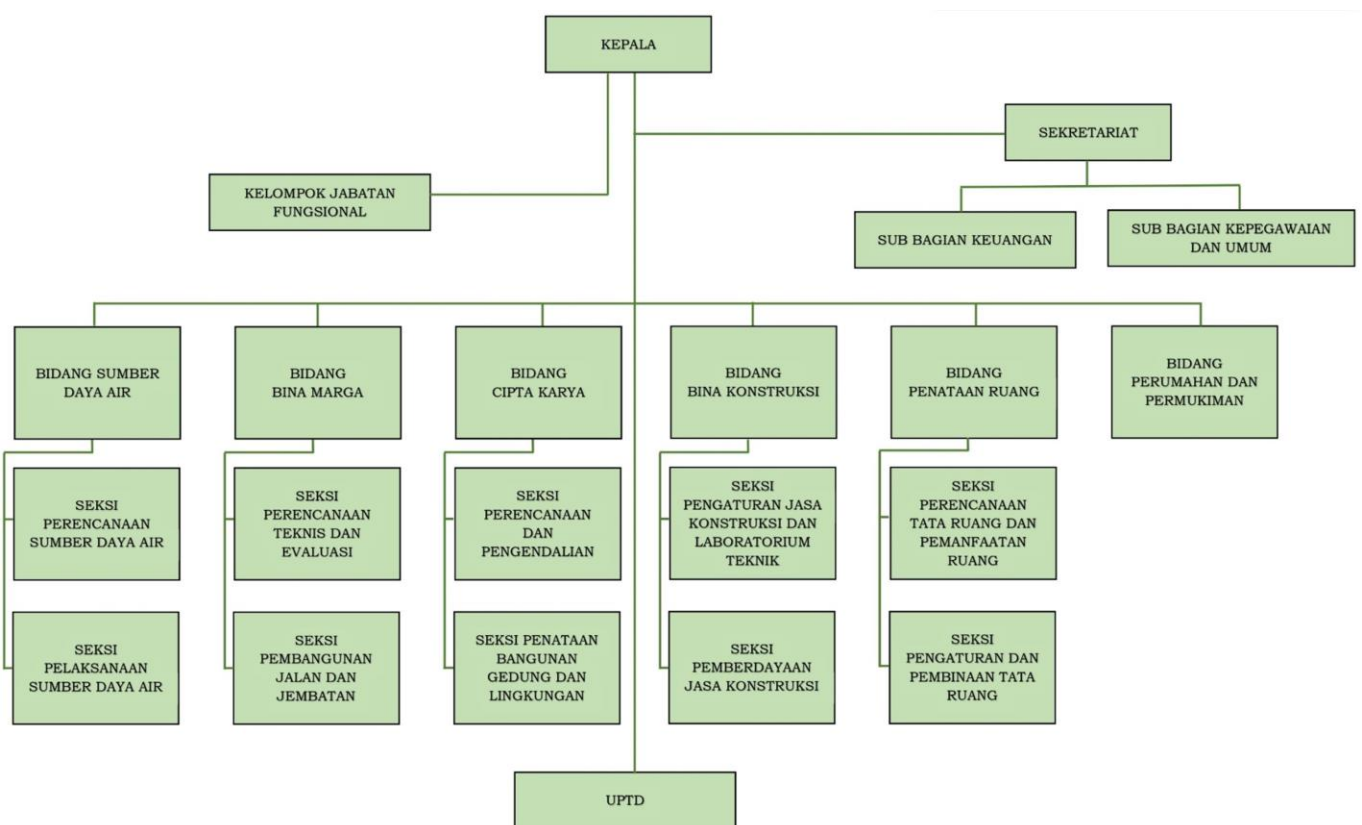
- c. Sub Urusan Persampahan, kewenangan Provinsi;
 - d. Sub Urusan Air Limbah, kewenangan Provinsi;
 - e. Sub Urusan Drainase, kewenangan Provinsi;
 - f. Sub Urusan Permukiman, kewenangan Provinsi;
 - g. Sub Urusan Bangunan Gedung, kewenangan Provinsi;
 - h. Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kewenangan Provinsi;
 - i. Sub Urusan Jalan, kewenangan Provinsi;
 - j. Sub Urusan Jasa Konstruksi, kewenangan Provinsi;
 - k. Sub Urusan Penataan Ruang, kewenangan Provinsi.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari 4 urusan antara lain:
- a. Sub Urusan Perumahan, kewenangan Provinsi;
 - b. Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi;
 - c. Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan Provinsi;
 - d. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan Provinsi.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang terdiri dari 8 urusan antara lain:
- a. Sub Urusan Izin Lokasi, kewenangan Provinsi;
 - b. Sub Urusan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, kewenangan Provinsi;
 - c. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan, kewenangan Provinsi;
 - d. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, kewenangan Provinsi;
 - e. Sub Urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelbihan Maksimum dan Tanah Absentee, kewenangan Provinsi;
 - f. Sub Urusan Tanah Ulayat, kewenangan Provinsi;
 - g. Sub Urusan Tanah Kosong, kewenangan Provinsi;
 - h. Sub Urusan Penggunaan Tanah, kewenangan Provinsi.

1.5 Gambaran umum Dinas PUPR Provinsi NTT

1.5.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi **Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur** terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Susunan organisasi secara umum adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi NTT



Jabatan Struktural pada Dinas PUPR Provinsi NTT sesuai Pergub SOTK Nomor 74 Tahun 2023.

1.5.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur

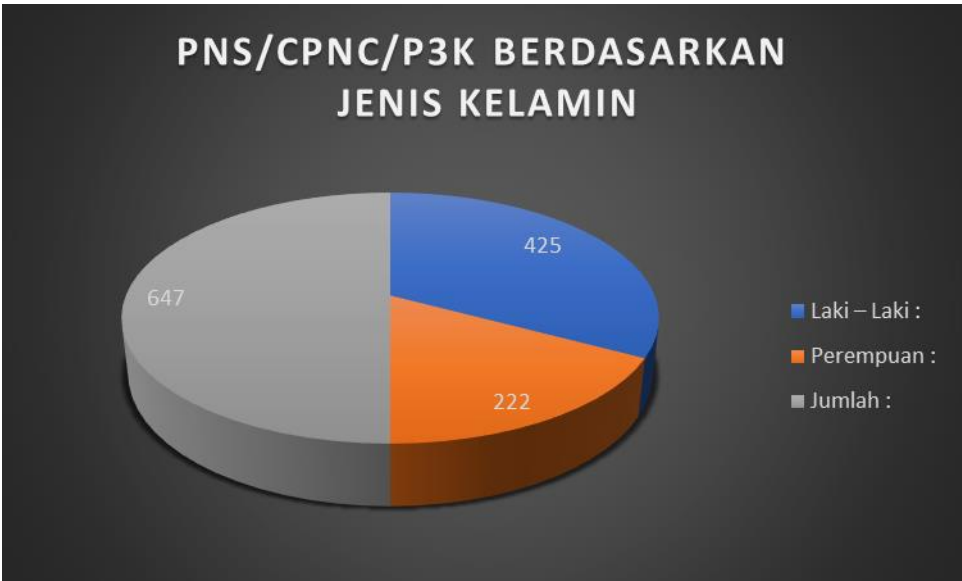
1.5.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 637 orang Pegawai. Jumlah tersebut mencerminkan kekuatan organisasi dalam menjalankan pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Rincian klasifikasi pegawai yang ada pada Dinas PUPR Provinsi NTT dapat disajikan dalam tabel berikut:

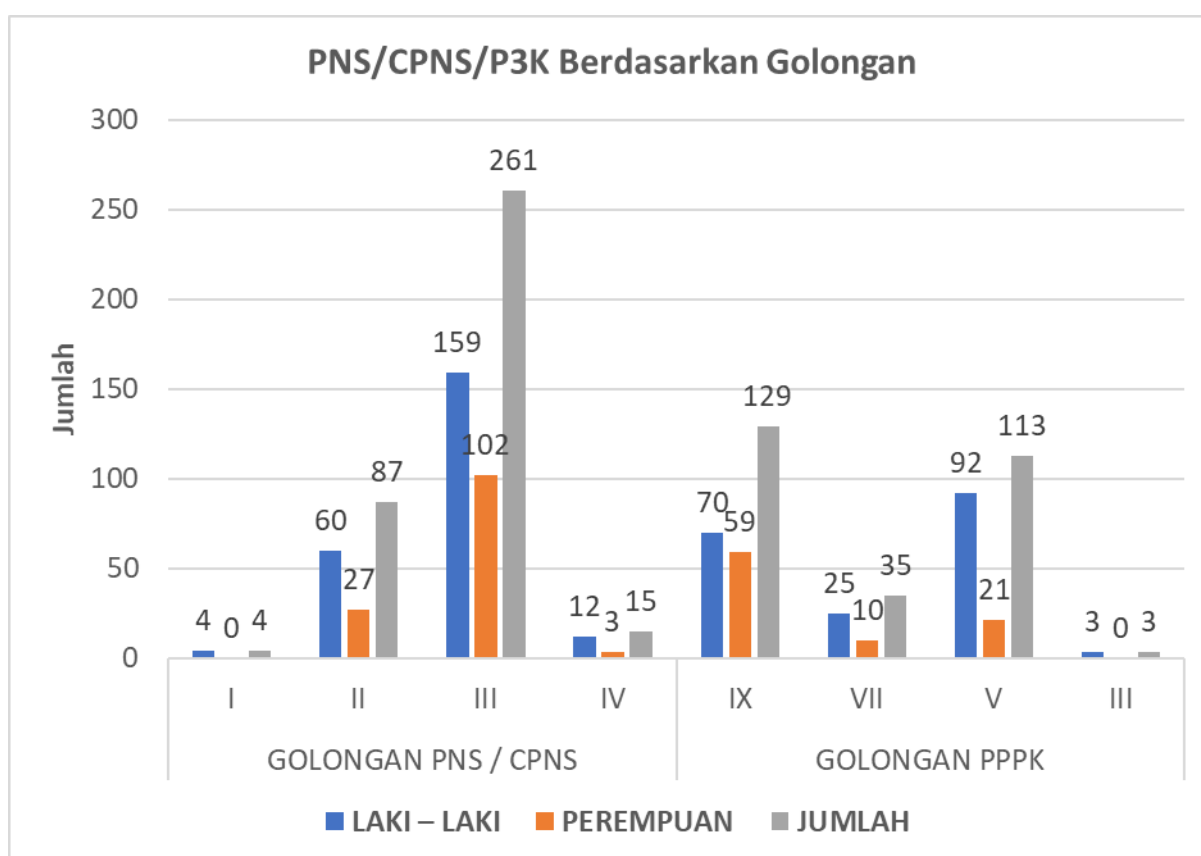
*Tabel 1.1 Jumlah PNS/CPNS/P3K Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Jenis Kelamin*

PNS/CPNS/P3K berdasarkan Jenis Kelamin :		
Laki - Laki	:	425
Perempuan	:	222
Jumlah	:	647



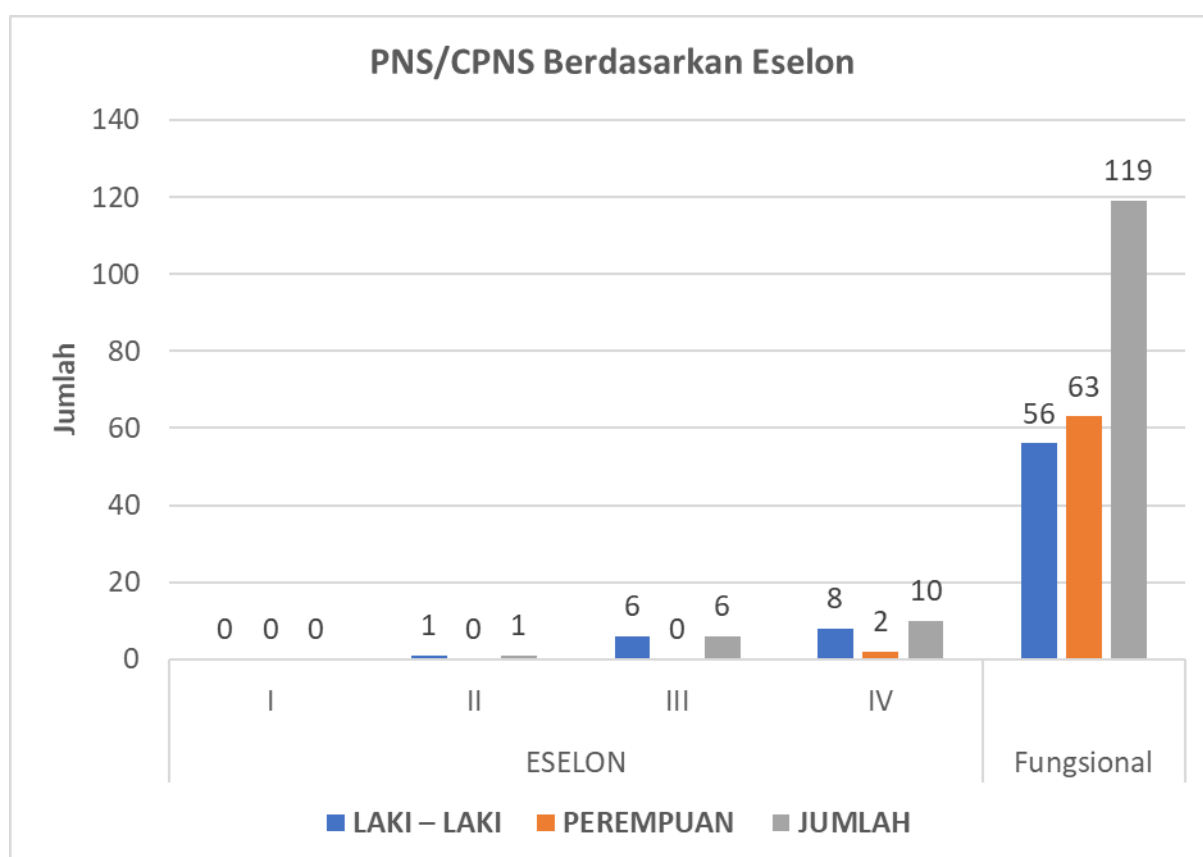
*Tabel 1.3 Jumlah PNS/CPNS/P3K Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Golongan*

JENIS KELAMIN	GOLONGAN PNS / CPNS				GOLONGAN PPPK				JUMLAH
	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. IX	Gol. VII	Gol. V	Gol. III	
LAKI - LAKI	4	60	159	12	70	25	92	3	425
PEREMPUAN	0	27	102	3	59	10	21	0	222
JUMLAH	4	87	261	15	129	35	113	3	647



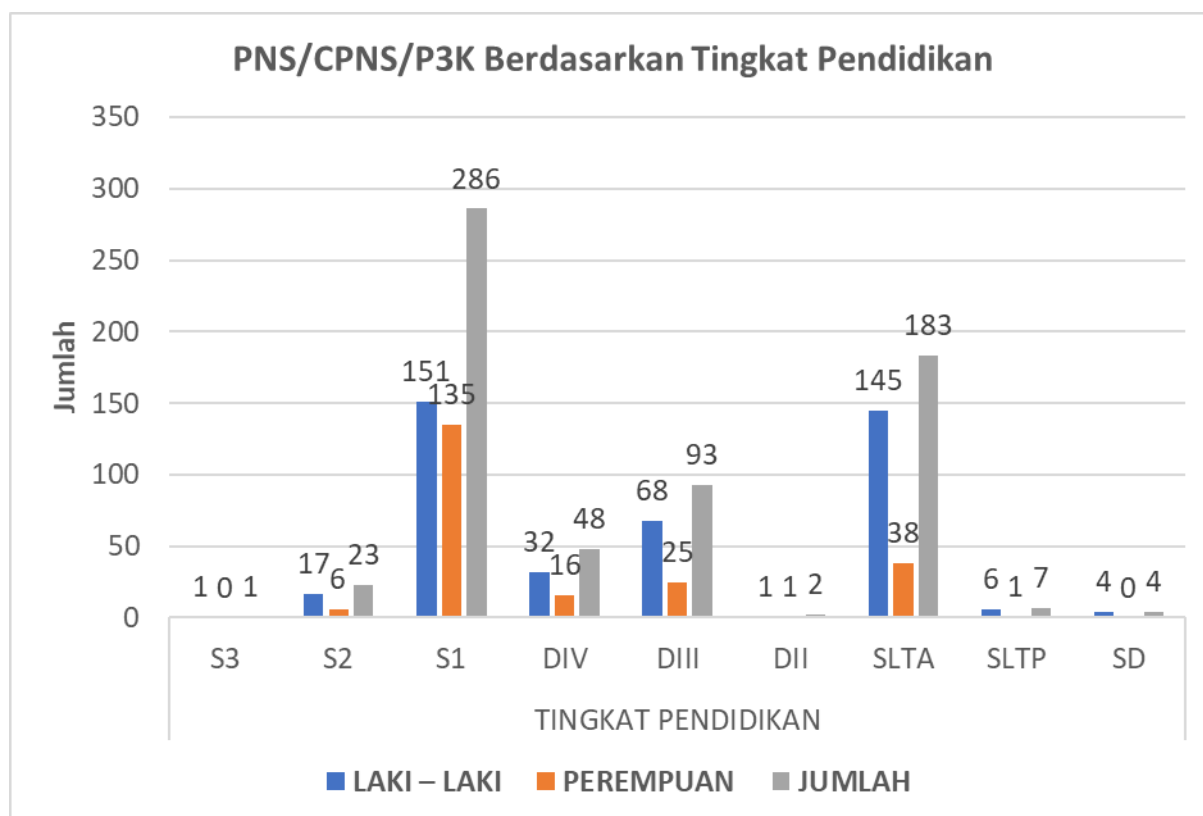
*Tabel 1.4 Jumlah PNS/CPNS/P3K Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Eselon*

JENIS KELAMIN	ESELON				Fungsional	JUMLAH
	I	II	III	IV		
LAKI - LAKI	0	1	6	8	56	71
PEREMPUAN	0	0	0	2	63	65
JUMLAH	0	1	6	10	119	136



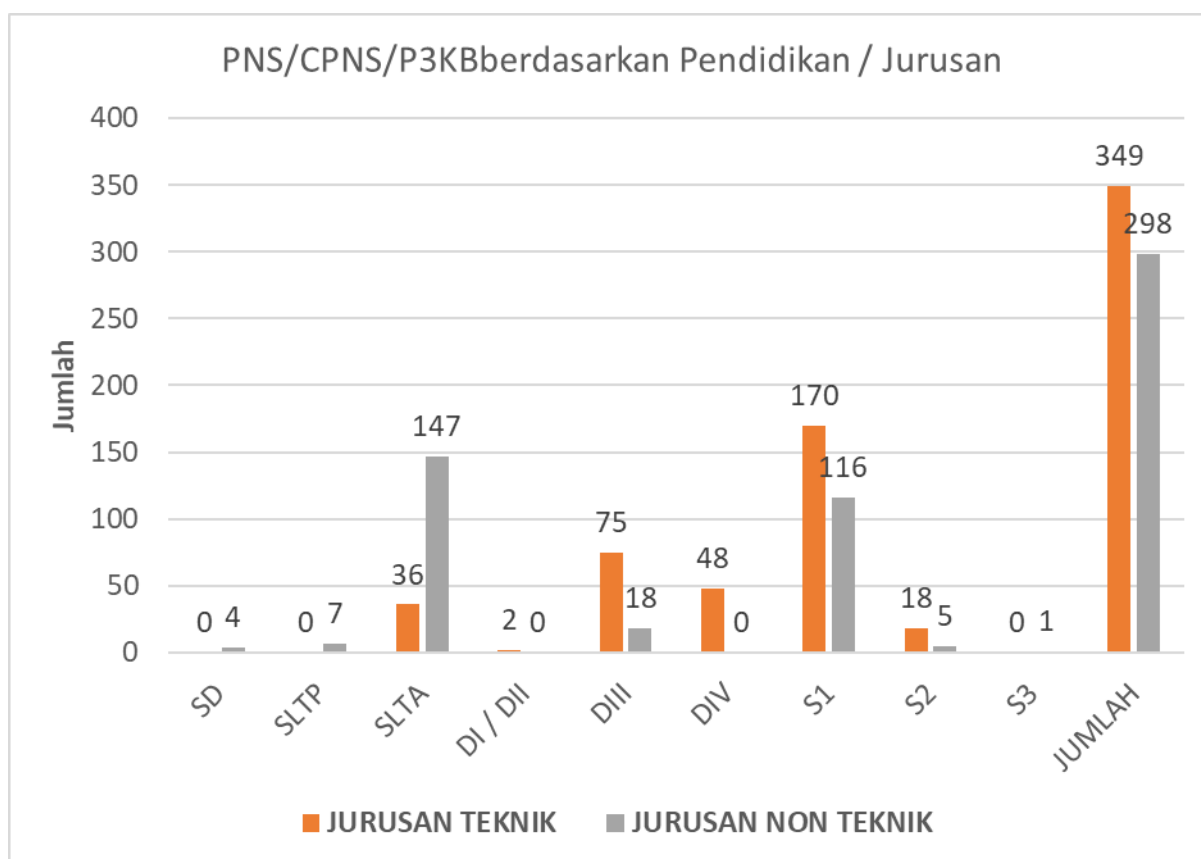
*Tabel 1.5 Jumlah PNS/CPNS/P3K Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Tingkat Pendidikan*

JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	
LAKI – LAKI	1	18	150	31	66	1	143	4	4	418
PEREMPUAN	0	6	134	16	23	1	38	1	0	219
JUMLAH	1	24	284	47	89	2	181	5	4	637



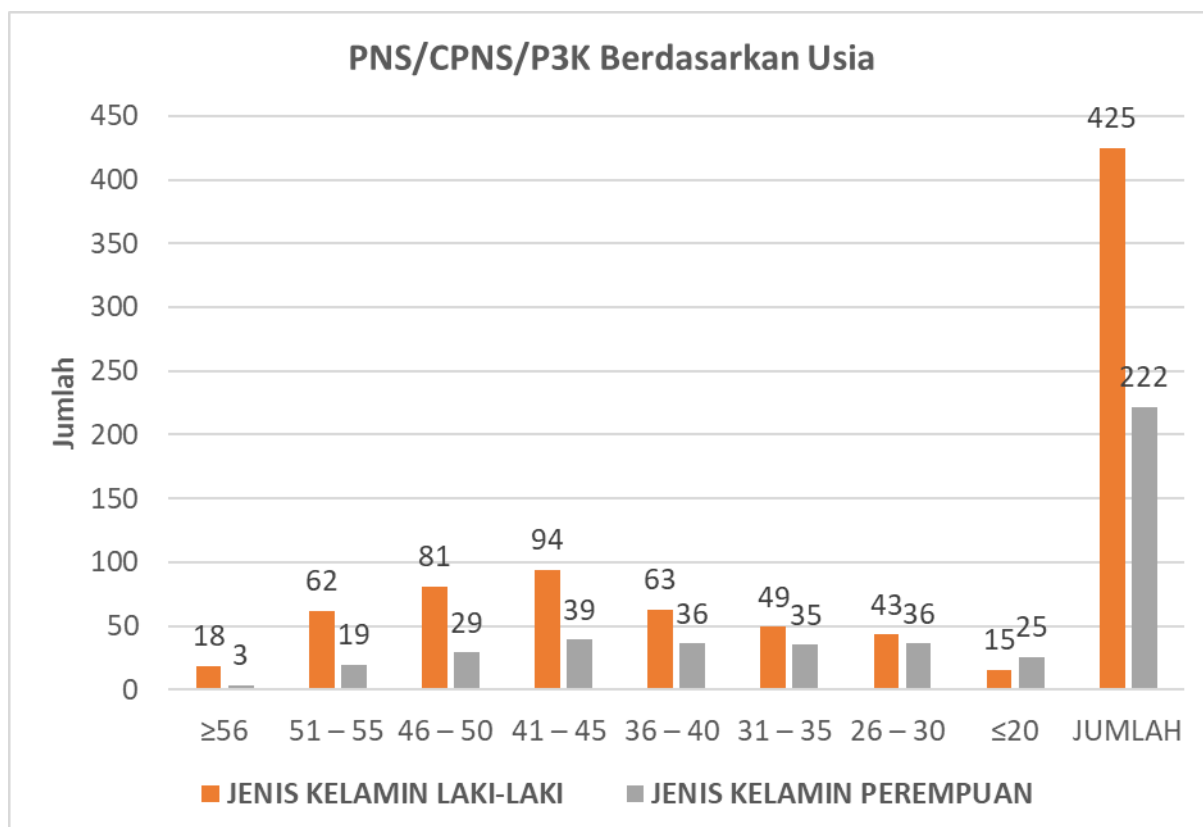
Tabel 1.6 Jumlah PNS Dinas PUPR Provinsi NTT berdasarkan Pendidikan/Jurusan

TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN		JUMLAH
	TEKNIK	NON TEKNIK	
SD	0	4	4
SLTP	0	5	5
SLTA	36	145	181
DI / DII	2	0	2
DIII	74	15	89
DIV	47	0	47
S1	169	115	284
S2	19	5	24
S3	0	1	1
JUMLAH	347	290	637



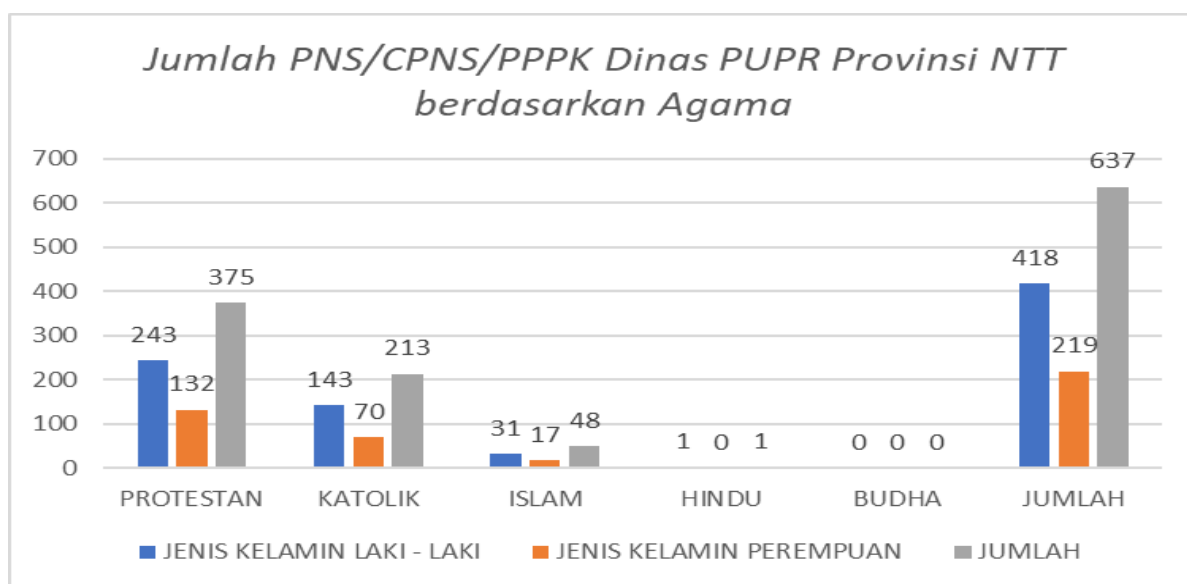
*Tabel 1.7 Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Usia*

USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
≥56	17	2	19
51 – 55	62	17	79
46 – 50	80	29	109
41 – 45	92	40	132
36 – 40	59	34	93
31 – 35	49	35	84
26 – 30	43	36	79
≤20	16	26	42
JUMLAH	418	219	637



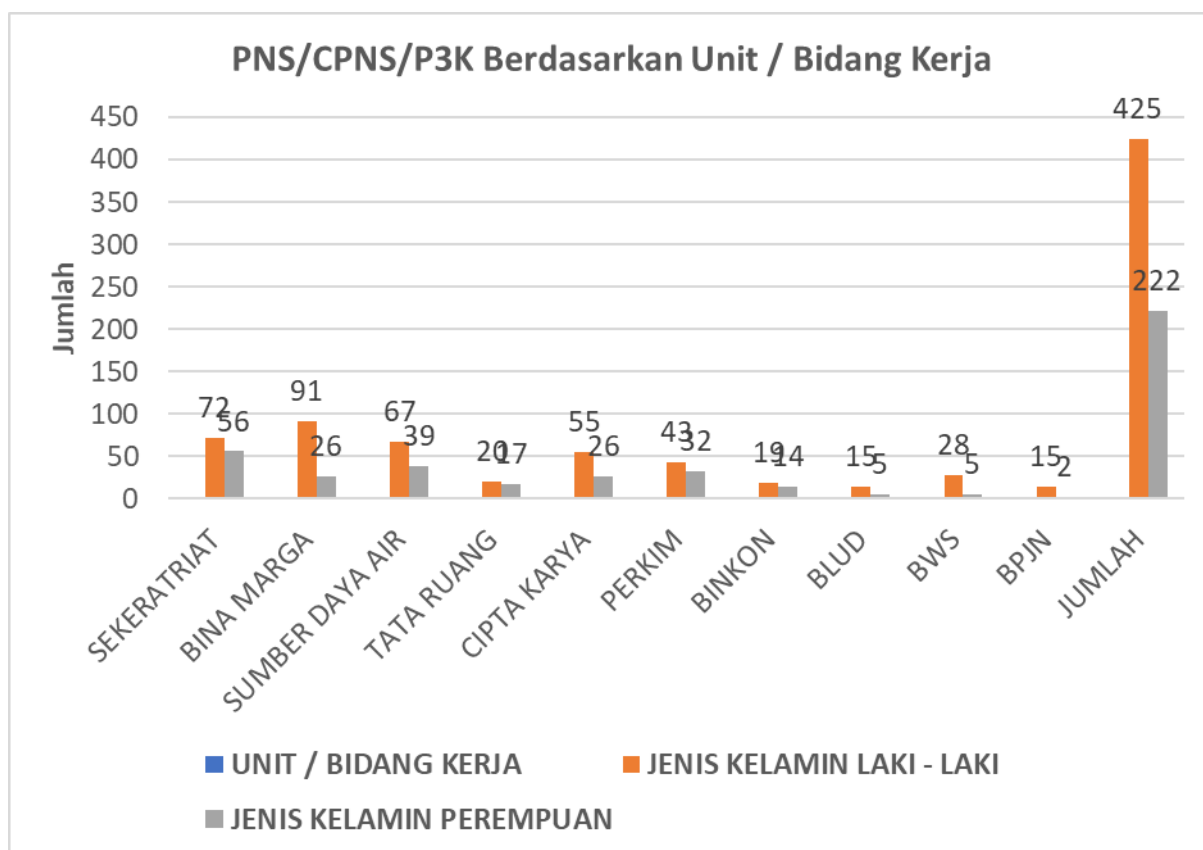
*Tabel 1.8 Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Agama*

AGAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
PROTESTAN	243	132	375
KATOLIK	143	70	213
ISLAM	31	17	48
HINDU	1	0	1
BUDHA	0	0	0
JUMLAH	418	219	637



*Tabel 1.9 Jumlah PNS/CPNS/PPPK Dinas PUPR Provinsi NTT
berdasarkan Unit/Bidang Kerja*

UNIT / BIDANG KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
SEKERATRIAT	68	54	122
BINA MARGA	90	26	116
SUMBER DAYA AIR	67	39	106
TATA RUANG	20	17	37
CIPTA KARYA	55	26	81
PERKIM	42	32	74
BINKON	17	13	30
BLUD	15	5	20
BWS	29	5	34
BPJN	15	2	17
JUMLAH	418	219	637



1.6 Kondisi Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan pelayanan diperlukan sarana dan prasarana SKPD yang memadai, adapun keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 10

Sarana dan Prasarana Dinas PUPR Prov NTT Per 31 Desember 2025

NO	GOL	NAMA BIDANG BARANG		KET KONDISI
1	2		4	6
1	01	A.	TANAH	
		a.	Tanah Bangunan Gedung dan Bangunan Lainnya	Baik
		b.	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	Baik
		c.	Tanah Daerah Irigasi (D.I)	Baik
2	02	B.	PERALATAN DAN MESIN	
		a	Alat-alat Besar	Baik
		b	Alat-alat Angkutan	Baik
		c	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Baik
		d	Alat-alat Pertanian / Peternakan	Baik
		e	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Baik
		f	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Baik
		g	Alat-alat Kedokteran	Baik
		h	Alat-alat Laboratorium	Baik
		i	Alat-alat Keamanan	Baik
3	03	C.	GEDUNG DAN BANGUNAN	
		a	Bangunan Gedung	Baik
		b	Bangunan Monumen	Baik
4	04	D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
		a	Jalan	Baik
		b	Jembatan	Baik
		c	Bangunan Air/ Irigasi	Baik
		d	Instalasi	Baik
		e	Jaringan	Baik
5	05	E.	ASET TETAP LAINNYA	
		a	Buku Perpustakaan	Baik
		b	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Baik
		c	Hewan Ternak dan Tumbuhan	Baik
		d	Alat-alat Persenjataan serta Keamanan	Baik

1.7 Anggaran

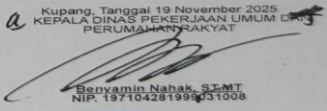
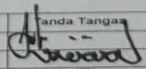
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 193.368.808.591.- dengan rincian disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.11

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

25/11/25, 14.51

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					PERUBAHAN DPPA-SKPD	
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR						
TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPPA/A.4/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025						
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
					(Rp)	(%)
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp2.000.000.000,00	Rp5.700.000.000,00	Rp3.700.000.000,00	64.91
4	1 02	Retribusi Daerah	Rp2.000.000.000,00	Rp5.700.000.000,00	Rp3.700.000.000,00	64.91
5	1	BELANJA OPERASI	Rp81.331.200.639,00	Rp85.356.028.827,00	Rp4.024.828.188,00	4.72
5	1 01	Belanja Pegawai	Rp39.812.098.100,00	Rp39.331.534.676,00	(Rp480.563.424,00)	(1.22)
5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp41.519.102.539,00	Rp46.024.494.151,00	Rp4.505.391.612,00	9.79
5	2	BELANJA MODAL	Rp99.094.824.874,00	Rp108.012.779.764,00	Rp8.917.954.890,00	8.26
5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp348.528.266,00	Rp1.303.322.323,00	Rp954.794.057,00	73.26
5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp2.542.950.000,00	Rp2.542.950.000,00	100.00
5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp98.746.296.608,00	Rp104.145.987.441,00	Rp5.399.690.833,00	5.18
5	2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp20.520.000,00	Rp20.520.000,00	100.00
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*)			Kupang, Tanggal 19 November 2025 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  Benyamin Nahak, S.T.M.T. NIP. 19710428199031008  Benyamin Nahak, S.T.M.T. NIP. 19710428199031008
Januari		Rp166.666.666,00	Januari		Rp3.444.409.254,00	
Februari		Rp166.666.666,00	Februari		Rp3.445.339.154,00	
Maret		Rp259.166.666,00	Maret		Rp3.590.130.735,00	
April		Rp351.666.666,00	April		Rp6.190.790.342,00	
Mei		Rp444.166.666,00	Mei		Rp4.505.989.535,19	
Juni		Rp453.333.333,00	Juni		Rp6.867.928.028,90	
Juli		Rp1.008.333.333,00	Juli		Rp11.918.138.824,11	
Agustus		Rp1.008.333.333,00	Agustus		Rp17.369.240.061,33	
September		Rp453.333.333,00	September		Rp11.661.881.083,00	
Oktober		Rp511.666.666,00	Oktober		Rp7.885.936.295,00	
November		Rp518.333.333,00	November		Rp61.871.988.374,89	
Desember		Rp358.333.339,00	Desember		Rp54.617.036.903,58	
Jumlah		Rp5.700.000.000,00	Jumlah		Rp193.368.808.591,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Yosef M. Ronaldus Amapihan, S.Si	197101082000121004	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA			
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Sekretaris BAPPERIDA			

https://slpd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/skpd/332

1/1

<https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/skpd/332>

1/1

1.8 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Tahun 2025, maka isu strategis dan permasalahan yang menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat berdasarkan Pelayanan Urusan dapat di gambarkan sebagai berikut berikut:

1) Sub Urusan Jalan

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah pesisir yang rentan abrasi dan cuaca ekstrem
- Pembenahan segmen jalan yang rusak, sempit, dan belum sesuai standar pelayanan jalan wisata agar meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta mempercepat waktu tempuh wisatawan menuju Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya
- Peningkatan kualitas dan standar ruas jalan akses pesisir untuk mendukung kelancaran mobilitas nelayan dan pembudidaya serta memperlancar distribusi hasil perikanan dan budidaya laut menuju pasar dan pelabuhan
- Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan provinsi yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan sentra produksi perikanan dan pertanian guna memperlancar transportasi barang dan orang serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
- Peningkatan kualitas jalan untuk menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi, serta memperkuat daya saing hasil pertanian dan perikanan di pasar lokal maupun luar daerah.

1) Sub Urusan SDA

- Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi agar indeks tanam meningkat lebih dari 150% (1,5 kali tanam) per tahun
- Optimalisasi fungsi embung kecil untuk mendukung ketahanan air dan pertanian
- Peningkatan keberlanjutan fungsi embung melalui penguatan pembiayaan, kapasitas kelembagaan pengelola, dan partisipasi masyarakat guna mencegah pendangkalan, kebocoran, serta penurunan daya tampung air
- Peningkatan efektivitas dan keandalan jaringan irigasi melalui rehabilitasi, normalisasi, serta pengendalian kebocoran agar distribusi air ke lahan pertanian dapat optimal dan mendukung produktivitas sawah.

2) **Sub Urusan Air Minum, sanitasi & sampah, drainase dan Bangunan Gedung**

- Meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan SPAM lintas kabupaten/kota sesuai target perencanaan serta memperkuat kapasitas pengelolaan SPAM kewenangan provinsi agar memenuhi standar nasional
- Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem penyediaan air minum melalui pengendalian kehilangan air, optimalisasi pemanfaatan sumber air baku, perluasan cakupan distribusi, serta penguatan manajemen pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa
- Meningkatkan dukungan pendanaan dan efisiensi pembiayaan dalam pengembangan serta operasional SPAM agar lebih berkelanjutan dan seimbang antara biaya dan pendapatan
- Meningkatkan kapasitas manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan daya pada unit pengelola SPAM agar kinerja layanan lebih optimal dan berkelanjutan
- Meningkatkan kualitas bangunan gedung kewenangan daerah agar lebih inklusif dan aksesibel, terutama bagi penyandang disabilitas
- Meningkatkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah negara agar lebih efektif dan sesuai ketentuan
- Mempercepat penataan kawasan strategis daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mendukung pengembangan wilayah

3) **Sub Urusan Jasa Konstruksi**

- Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.
- Meningkatkan jumlah lulusan teknik yang memiliki sertifikat kompetensi kerja untuk menekan angka pengangguran.
- Memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi penyelenggaraan jasa konstruksi pada lingkup provinsi.
- Menyediakan dan mengoptimalkan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi provinsi.
- Menetapkan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi guna memberikan kepastian hukum di sektor jasa konstruksi.

- Mengoptimalkan penggunaan laboratorium pengujian material konstruksi untuk meningkatkan pengendalian mutu.
- Memperkuat peran Dinas PUPR sebagai instansi pembina jasa konstruksi dalam pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi.

4) **Sub Urusan Tata Ruang**

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya tata ruang dalam mendukung pembangunan daerah.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM bidang penataan ruang, khususnya dalam evaluasi RTRW provinsi/kabupaten/kota dan penyusunan peta.
- Memperkuat pemahaman pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan RTRW agar kualitas dokumen tata ruang lebih optimal.

5) **Sub Urusan Permukiman & Pertanahan**

- Meningkatkan pendataan dan validasi penyediaan serta rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi agar lebih optimal.
- Meningkatkan kualitas hunian relokasi agar layak huni, dilengkapi fasilitas umum, memiliki kejelasan status lahan, serta sesuai dengan kebutuhan sosial budaya dan mata pencaharian masyarakat terdampak bencana.
- Menata permukiman tidak layak huni melalui pengaturan bangunan, pengendalian kepadatan, serta peningkatan kualitas bangunan, sarana, dan prasarana.
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan agar memenuhi standar pelayanan minimal.
- Menyinkronkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan rencana tata ruang wilayah, serta menyelesaikan status tanah yang belum bersertifikat atau tumpang tindih kepemilikan.
- Menata dan menyelesaikan permasalahan tanah ulayat lintas kabupaten/kota melalui harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, penyelesaian sengketa, serta pencegahan praktik mafia tanah.
- Mempercepat sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum dan pemanfaatannya.
- Melaksanakan penatausahaan tanah kosong agar dapat dimanfaatkan bagi

kepentingan masyarakat dan pemerintah.

- Memperkuat fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan melalui penanganan kebijakan bermasalah masa lalu, penertiban regulasi agraria, penyelesaian tumpang tindih penggunaan tanah, peningkatan kapasitas SDM aparat pelaksana, serta pengendalian perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah.

6) **LAIN-LAIN:**

- Menyusun dan menetapkan SOP khusus penanganan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana agar penanganan lebih terarah dan efektif
- Membentuk dan memperkuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kabupaten untuk meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan penanganan bencana di lapangan.

1.9 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. IKHTISAR EKSEKUTIF
4. Bab I: PENDAHULUAN

Memuat penjelasan umum organisasi serta permasalahan utama dan isu organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sekilas pengantar lainnya.

5. **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhsarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan serta program-program pembangunan, Indikator Kinerja terksait ringkasan /iktisar Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi terhadap setiap sasaran strategis pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi Nusa

7. BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap pencapaian kinerja organisasi serta upaya mendatang yang akan dilakukan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

8. LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1

9. INSTRUMEN PENDUKUNG

10. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas PUPR Provinsi NTT memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur jalan, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, Jasa konstruksi dan pertanahan sebagai penopang pembangunan wilayah kepulauan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia teknis, kondisi infrastruktur eksisting yang belum merata, keterbatasan anggaran daerah, serta perlunya penguatan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Kerentanan terhadap bencana alam menjadi faktor penting yang harus diakomodasi dalam perencanaan strategis. Oleh karena itu, perencanaan strategis Dinas PUPR Provinsi NTT harus diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar, penerapan perencanaan berbasis data dan risiko, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sehingga perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang masih mengacu dalam rencana strategi RPD Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026.

2.2 Visi dan Misi Organisasi

2.2.1 VISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

***“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur
dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.***

2.2.2 MISI

Visi Daerah masih mengacu pada RPD 2024 – 2026 tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa Misi, yaitu :

- Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
- Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
- Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
- Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
- Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;
- Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab untuk mengemban Misi ke 4, yaitu:

***“Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki
keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan”.***

2.3 Tujuan Dan Sasaran

2.3.1 Tujuan

Mengacu pada Visi Pemerintah Daerah yaitu “Nusa Tenggara Timur yang

Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, serta misi yang telah ditargetkan maka sesuai RPD Provinsi NTT ditetapkan Tujuan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial. Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
2. Mempercepat Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
3. Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum
4. Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Upaya Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat
7. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang
9. Mewujudkan Permukiman yang layak Huni bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi
10. Menciptakan Kawasan kewenangan Provinsi bebas Kumuh
11. Menciptakan Lingkungan yang memiliki sanitasi layak
12. Membangun lingkungan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

13. Menyediakan Tanah untuk Kepentingan umum dan Pendataan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/ kota daerah Provinsi

2.3.2 Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan keandalan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan
2. Menurunnya Daya Rusak Air
3. Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen
4. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi
5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak
6. Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Persampahan TPS/TPSP/SPA
7. Meningkatnya Cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
8. Meningkatnya Cakupan Penanganan Sistem Drainase Perkotaan
9. Meningkatnya Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP
10. Meningkatnya kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara
11. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
12. Meningkatnya Kualitas Kermantapan Jalan Wewenang Provinisi
13. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi
14. Meningkatnya kualias tata ruang daerah
15. Tersedianya rumah layak bagi warga yang terkena relokasi rumah program

- pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi
16. Menurunnya tingkat kekumuhan kawasan kewenangan Provinsi
 17. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki sanitasi layak
 18. Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
 19. Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu
 20. Memfasilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota daerah Provinsi

2.4 Strategi Dan Kebijakan

2.4.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan penyediaan air baku bagi ketahanan pangan.
2. Cakupan pembangunan Perkuatan Tebing Sungai di WS Kewenangan Provinsi.
3. Pemantapan fungsi-fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air.
4. Melaksanakan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun.
5. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi.
6. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60.328 ha).
7. Melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses masyarakat terhadap sumber air minum layak.

8. Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan.
9. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
10. Menyusun Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
11. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

2.4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2024-2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada Matrik tujuan ,sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah masing masing Misi beserta indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 .1 Strategi dan Kebijakan Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia							
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						2024	2025
						2026	
1.	Meningkatkan penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	1.1. Meningkatkan ketersediaan Air Baku dalam menunjang	1.1.1. Peningkatan cakupan penyediaan air baku bagi ketahanan		Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan	-

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
		ketahanan pangan	an pangan	untuk kegiatan embung	Hidup untuk kegiatan embung	
				Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor	Mengusulkan Rencana Teknik dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Sumur Bor
				Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU	Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU	Mengusulkan pembangunan sumur Bor di daerah dengan dana DAU
				Mengusulkan Pembangunan Embung dengan	Mengusulkan Pembangunan Embung dengan	Mengusulkan Pembangunan Embung dengan

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				dana DAU	dana DAU	dana DAU
		1. Menurunnya Daya Rusak Air 2.	1.2. Cakupan pembangunan Perkuatan Tebing Sungai di WS Kewenangan Provinsi.	Mengusulkan Rencana Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kons truksi Penger dali Banjir	-	-
				-	Meningkatkan Bangunan Perkuatan Tebing pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Bangunan Perkuatan Tebing pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
		1. Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen	1.3. Pemantauan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) melalui Program ePAKSI.
				Pengusulan pembuat Program Sistem Informasi Aset SDA & Irigasi	-	-
				Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah	Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi	Peningkatan Jaringan irigasi pada Daerah Irigasi

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Irigasi Permu- kaan kewena- ngan Provinsi menggu- nakan dana DAU dan DAK	Permu- kaan kewenan- gan Provinsi menggu- nakan dana DAU dan DAK	Permuk- aan kewena- ngan Pro- vinsi meng- guna- kan dana DAU dan DAK
				Rehabili- tasi Jari- ngan irigasi pada Daerah Irigasi Permu- kaan kewena- ngan Provinsi menggu- nakan dana DAU dan DAK	Rehabili- tasi Jari- ngan irigasi pada Daerah Irigasi Permu- kaan kewenan- gan Provinsi menggu- nakan dana DAU dan DAK	Rehabili- tasi Jaringa- n irigasi pada Dae rah Irigasi Permuk- aan kewe na- ngan Pro- vinsi meng- guna- kan dana DAU dan DAK

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia							
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan							
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
				2024	2025	2026	
2.	Mempercepat Pengembangan Ekonomi masyarakat melalui Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi	2.1. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur Sumber Daya air dan Irigasi	2.1.1. Melaksanakan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampungan air setiap tahun	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai	Pemeliharaan Embung kecil yang telah secara Rutin dan berkala guna memperpanjang umur pakai	
				Pengoperasian Embung Kecil secara baik	Pengoperasian Embung Kecil secara baik	Pengoperasian Embung Kecil secara baik	
				Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	Rehabilitasi, Pemeliharaan Rutin dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2024	2025	2026	
			Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)	Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)	Studi Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Aknop)	
		2.1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	
		2.1. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya	Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala dan Rutin Bangunan irigasi yang telah	Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala dan Rutin Bangunan irigasi yang telah	Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala dan Rutin Bangunan irigasi yang telah	

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
			a (42 DI = 60.328 ha)	terbang un	terbang un	terbang un
				Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan	Studi AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan
3	Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum	3.1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	3.1.1. Melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses masyarakat terhadap sumber air minum layak	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
				Melaksanakan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/	Melaksanakan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/	Melaksanakan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2024	2025	2026	
			Perbaikan SPAM	Perbaikan SPAM	an SPAM	
			Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi	Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi	Melaksanakan pembangunan air minum layak berdasarkan kewenangan provinsi	
	3.2. Meningkatkan Cakupan Sistem Pengelolaan Persampahan TPS/TPSP/SPA	3.2.1 Mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
		3.3. Meningkatkan Cakupan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	3.3.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
		3.4. Meningkatkan Cakupan Penanganan Sistem Drainase Perkotaan	3.4.1. Menyusun Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah	Melakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
		3.5. Meningkatkan Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	3.5.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Melakukan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
4.	Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	4.1. Meningkatkan kualitas bangunan gedung negara dan pengelolaan rumah negara	4.1.1. Melakukan kolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan	Menyenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Menyenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Menyenggarakan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia							
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						2024	2025
				gedung negara	untuk Kepentingan Strategis Provinsi	untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
5.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	5.1	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	5.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
6.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dalam Upaya Mendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.1. Meningkatkan Kualitas Kermantapan Jalan Wewenang Provinisi	6.1. Mempertahankan Kondisi Kermantapan Jalan Wewenang Provinsi	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan	Melaksanakan Survei kondisi jalan guna mendapatkan nilai nyata tingkat kondisi jalan
				Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan Umur Rencana yang	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan Umur Rencana yang Ditetapkan	Melaksanakan Rekonstruksi Jalan yang dalam Kondisi Rusak agar Bagian Jalan Tersebut Mempunyai Kondisi Mantap Kembali sesuai dengan Umur Rencana yang

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Ditetapkan		Ditetapkan
				Rehabilitasi jalan Provinsi melalui Dana DAU, DAK, Hibah serta Pinjaman Daerah	Rehabilitasi jalan Provinsi melalui dana DAU, DAK, Hibah serta pinjaman daerah	Rehabilitasi jalan Provinsi melalui dana DAU, DAK, Hibah serta pinjaman daerah
				Melaksanakan Pemeliharaan Jalan secara Berkelanjutan guna Memperpanjang Umur Layan Jalan	Melaksanakan pemeliharaan Jalan secara berkelanjutan guna memperpanjang umur pakai jalan	Melaksanakan pemeliharaan Jalan secara berkelanjutan guna memperpanjang umur pakai jalan

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layanan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layanan yang ditargetkan kembali.	Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layanan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layanan yang ditargetkan kembali.	Melaksanakan Penggantian Jembatan yang dalam Kondisi Rusak atau yang telah Mencapai Umur Layanan agar Jembatan Tersebut dapat berfungsi dengan Umur Layanan yang ditargetkan kembali.
				Melaksanakan Rehabilitasi pada Bagian Jembatan agar	Melaksanakan Rehabilitasi pada	Melaksanakan Rehabilitasi pada

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Dapat Berfungsi dengan baik	Bagian Jembatan agar Dapat Berfungsi dengan baik	Bagian Jembatan agar Dapat Berfungsi dengan baik
7.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur untuk mempercepat Pengembangan Ekonomi	7.1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	7.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Melaksanakan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
				Melakukan Pembinaan untuk Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyele nggaraan Jasa		

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan		
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang	8.1. Meningkatkan Kualitas Tata Ruang Daerah	8.1.1. Peningkatan Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
			8.1.2. Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitas Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitas Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Melaksanakan Fasilitas Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi
				Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT
9.	Mewujudkan Permukiman yang layak Huni bagi warga yang terkena relokasi rumah	9. Tersedianya rumah layak bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah	9.1. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi warga yang	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan identifik	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan identifik	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni melalui kegiatan

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
	program pemerintah provinsi atau terkena bencana tingkat provinsi	h provinsi atau terkena bencana a tingkat provinsi	terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi atau warga yang terkena bencana tingkat provinsi	asi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	asi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	identifikasi kasi dan pendataan tingkat kerusakan rumah bagi korban bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
10	Menciptakan Kawasan kewenangan Provinsi bebas Kumuh dan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	10.1	Menurunkan tingkat kekumuhan kawasan kewenangan Provinsi dan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	10.1.1	Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
11	Menciptakan Lingkungan yang memiliki sanitasi layak	1.1. Meningkatkan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	11.1. Penyediaan sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi	Penangan/ Pembangunan/ Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penangan/ Pembangunan/ Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Penangan/ Pembangunan/ Rehabilitasi sanitasi layak bagi warga kawasan permukiman daerah provinsi (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)		
			11.2. Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
12	Membangun lingkungan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	1. Meningkatkan 2. nya 1. lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	12. Menyele 1.1 nggarakan Kegiatan Penyediaan Prasaran a, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata , Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata , Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)		

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan								
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
13	Menyediakan Tanah untuk Kepentingan umum dan Pendataan Penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota daerah Provins	13.1	Meningkatkan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	13.1	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	Koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	Koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	Koordinasi dan sinkronisasi Data Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)
		13.2	Memfasilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota	13.2	Menyeleenggarakan proses penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota Provinsi	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota Provinsi	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota

Visi : NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi : III. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan						
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
		daerah Provinsi	en/Kota daerah Provinsi	(Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Alor, Pulau Lembata, Kab. Sikka, Ende dan Kab. Nagekeo)	(Kab. Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Daratan Sumba)	daerah Provinsi (Kepulauan Flotim dan Daratan Timor)

2.5 Program Tahun 2025

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM
Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Meningkatnya Pelayanan terhadap	Luas Areal Irigasi Fungsional	

kebutuhan air irigasi dan Meningkatkan produksi panen		
Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah	Cakupan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki PERDA RUTR dan RDTR	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

2.6 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, maka ditetapkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Gubernur Nusa Tenggara

Timur tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut di bawah ini:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Benyamin Nahak, MT**
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **E. Melkiades Laka Lena**
Jabatan : **Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, Mei 2025

Pihak Kedua,


E. Melkiades Laka Lena

Pihak Pertama, 
Ir. Benyamin Nahak, MT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SDA dan Irigasi	1. Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	40 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kebutuhan Air Irigasi Dan Meningkatkan Produksi Panen	2. Luas Areal Irigasi Fungsional	2000 Ha
3.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terhadap Air Minum Layak	3. Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi	37,74 %
4.	Meningkatnya kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	4. Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %
5.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	5. Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	6. Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	66,94 %
		7. Cakupan Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	86,96 %

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 98.090.360.921,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 47.566.748.870,-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 753.356.350,-	Realisasi minimal 85%
	3. Penyelenggaraan Jalan	Rp. 42.042.381.881,-	Realisasi minimal 85 %
	4. Pengembangan Perumahan	Rp. 1.252.873.420,-	Realisasi minimal 85 %
	5. Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp. 200.000.000,-	Realisasi minimal 85 %
	6. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 2.059.329.828,-	Realisasi minimal 85 %
	7. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLUD)	Rp. 2.275.000.400,-	Realisasi minimal 85 %
b.	8. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD)	Rp. 1.940.670.172,-	Realisasi minimal 85 %
	Pendapatan	Rp. 5.700.000.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 103.790.360.921,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
a.	Program Dekonsentrasi	-	-
	1.		
b.	Program Tugas Pembantuan		
	1. TP OP SDA	Rp. 21.338.819.000,-	Realisasi minimal 85%
	2. TP Bina Marga	Rp. 8.867.243.000,-	Realisasi minimal 85%
	Jumlah Tugas Pembantuan	Rp. 30.206.062.000,-	Realisasi minimal 85%

- C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 50% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100%, pertanggal 31 Desember tahun 2025;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2025, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2025;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2025;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2025: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang diupload) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/PIhak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ir. Benyamin Nahak, MT

Gubernur Nusa Tenggara Timur,



E. Melkiades Laka Lena

2.7 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 193.368.808.591,-** dengan rincian **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 85.356.028.827,-** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 108.021.779.764,-**.

Jumlah anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

REALISASI BELANJA MODAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PRESEN TASE (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.885.514.974	2.966.098.869	99,28
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	820.756.983	773.604.299	45,03
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.004.236.317	1.918.847.200	95,73
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.184.140.570	94.871.459.040	93,76
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	37.753.000	37.684.500	99,81
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.614.480	50.505.000	99,78
7.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	29.863.440	29.858.445	99,98%
TOTAL		08.012.879.764,00	100.648.057.353,00	93,18%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah diamantkan para pemangku kepentingan yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan dengan membandingkan antara target yang akan dicapai dengan realisasi sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dan diikuti dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Urgensi pengukuran kinerja ini jelas tertuang dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang menegaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodic dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator sasaran dan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja, sehingga diketahui selisih kinerjanya. Berdasarkan selisih kinerja tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efesiensi dan efektivitas. Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun 2025, hasil ukuran kinerja yang dapat terukur terhadap 16 Indikator dalam 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 24 Kegiatan dengan sumber dana DAU, PKB, PAD, DBH dan SILPA. Meski demikian semua Indikator yang belum bisa tercapai oleh karena minimnya anggaran sehingga belum maksimal memenuhi target yang ditetapkan di Tahun 2025.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa

Tenggara Timur disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan dan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan capaian kinerja. Adapun skala pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Tabel III.1

Pengukuran Skala Ordinal

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$85 \% \leq X$	Sangat Berhasil	Hijau Tua
2.	$70 \% \leq X < 85 \%$	Berhasil	Hijau Muda
3.	$55 \% \leq X < 70 \%$	Cukup Berhasil	Kuning Tua
4.	$X \leq 55 \%$	Belum Berhasil	Merah

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja pada dasarnya dapat digambarkan sebagai hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dicapai oleh satu organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang antara lain dijabarkan dalam bentuk perjanjian kinerja organisasi.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap organisasi birokrasi atau perangkat daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan program /

kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas. Sejalan dengan hal ini maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran ringkas tentang capaian Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tahun Anggaran 2025. Sebagai instrumen verifikasi akan dilakukan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja tahun 2025 sebagai pengukuran gambaran target kinerja dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

3.2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 masih mengikuti Target RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penetapan target kinerja sesuai indikator kinerja dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel III.2
Sasaran Strategis dan Indikator Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI PELAKSANAAN 2025	
				TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	625,720	76.608
2.	Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	2000	56.95

3.	Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	69.73
4.	Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	%	18,18 (1) Lokasi/Ling	100 (2) Lokasi/Ling
5.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	100	73,90
6,	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	86,96	60,87

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

3.2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Secara umum untuk Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pembangunan infrastruktur telah menetapkan target kinerja penyelenggaraan Jangka Menengah yang sesuai indikator kinerja RPD Provinsi NTT dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam menjawab semua kebutuhan masyarakat bidang infrastruktur terhadap Indikator Kinerja Kunci yang digambarkan di tabel berikut :

Tabel III.3

Indikator Capaian Kinerja Kunci Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDOKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI PELAKSANAAN 2025	
				TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	625,720	76.608
2.	Meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan air irigasi dan meningkatkan produksi panen	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	2000	56.95
3.	Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	69.73
4.	Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	%	18,18 (1) Lokasi/Ling	100 (2) Lokasi/Ling
5.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	100	73,90
6,	Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataaan Ruang	Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	86,96	60,87

Selanjutnya akumulasi capaian indikator kinerja secara keseluruhan dapat dijelaskan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun anggaran 2025.

3.3 ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025 , Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan Indikator Kinerja Kunci, setidaknya terdapat 6 sasaran strategis yang wujud pelaksanaannya dalam 6 indikator kinerja di Tahun 2025 yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja “**Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan**” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel III.4 :

Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Satuan	Capaian s/d Tahun 2025	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	10.686.596. M3	625.720 M3	76.608 M3 (12,25%)	10.763.204 M3 (91,08 %)	625.720 M3	10.763.204 M3 (11.817,260) 91,08 %

Realisasi pencapaian Sasaran 1 : “Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan” dengan ukuran indikator :

1) *Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan adalah sbb:*

Indikator **Jumlah Ketersediaan Air Baku dalam Menunjang Ketahanan Pangan** pada tahun 2025 ditetapkan dengan **target sebesar 625.720 m³**.

Data kondisi kinerja sesuai ukuran target kinerja RPD Tahun 2024 - 2026 terkait Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan sesuai data kondisi baseline 2022 adalah 10.438.220 m³. Pada Tahun 2023 Jumlah ketersediaan Air Baku yang dapat menunjang ketahanan Pangan hanya dapat tercapai 175.800 m³ dan di Tahun 2024 hanya dapat mencapai 72.576 m³. Sehingga Jumlah ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2024 sudah mencapai 10.686.596 m³.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 , target yang ditentukan sebanyak 625,720 m³ dan realisasi ketersediaan air baku yang berhasil disediakan sebesar 76.608 m³, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai sekitar 10.763. 204 m³ atau 91,08 % . Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja hampir mencapai kondisi kinerja pada kahir tahun RPD direncanakan dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Meskipun demikian, realisasi ketersediaan air baku yang telah dicapai tetap memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebutuhan air untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan, khususnya pada wilayah prioritas. Capaian ini menjadi dasar penting untuk penguatan perencanaan dan penajaman sasaran kegiatan penyediaan air baku pada periode berikutnya.

Perhitungan Debit Sumur Bor :

- Asumsi Debit Sumur Bor = 4,2 m³ / jam
- Total jam operasi per hari = 8 jam; Total Debit per hari = 8 jam x 4,2 m³ = 33,6 m³ / hari
- Debit per bulan = 33,6 m³ x 30 hari = 1.008 m³ / bulan
- Debit setahun dihitung maskimal pada bulan basah (musim hujan) yaitu 4 bulan = 4 x 1.008 m³ = 4.032 m³ / tahun

Di Tahun 2025 terdapat penanganan pembangunan sumur bor sebanyak 14 Unit dengan sumber anggaran murni dan 5 Unit merupakan luncheon Tahun 2024 dan 3 Unit dengan sumber anggaran pada perubahan anggaran sehingga total target terbangun 22 Unit Sumur Bor atau 22 x 4.032 m³ = 88.704 m³. Akan tetapi terdapat 3 bangunan sumur bor tidak selesai dikerjakan dan sebagai paket luncheon tahun 2026, sehingga total keseluruhan bangunan air baku yang dapat mendukung ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan pada tahun 2025 adalah sebanyak 19 Unit Sumur Bor sehingga totalnya 19 x 4.032 m³ = 76.608 m³.

Dengan demikian Capaian kinerja Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan sampai dengan Tahun 2025 adalah Data kondisi Tahun 2022 (10.428.220 m³) +

Realisasi Tahun 2023 (175.800 m³) + Realisasi Tahun 2024 (72.576 m³) + Realisasi Tahun 2025 (76.608 m³) = 10.763.204 m³ atau 91,08%

Sehingga di akhir Renstra Dinas PUPR Prov.NTT perhitungan akhir Tahun 2026 sebesar 100% sebanyak 11.817,260 m³ maka sudah mencapai 91,08% (10.763.204 m³). Terdapat selisih 8,92 % yang masih harus mendapatkan penanganan untuk mencapai 100 %.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Volume Air dari Bangunan Penyedia Air Baku yang di bangun.

Kendala pencapaian realisasi adalah :

- Belum tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber air baku yang dapat dimanfaatkan secara optimal,
- kondisi hidrologis wilayah yang dipengaruhi oleh variabilitas curah hujan, serta kendala teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi infrastruktur penyediaan air baku.
- Selain itu, keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan juga berdampak pada belum optimalnya volume air baku yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana awal.

Sebagai solusi kondisi ini diharapkan :

- Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Air Yang Ada,
- Percepatan Penyelesaian Kegiatan Infrastruktur Air Baku,
- Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor, serta penyesuaian target yang lebih realistis berdasarkan kondisi eksisting dan daya dukung wilayah.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan capaian ketersediaan air baku secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka menunjang ketahanan pangan daerah.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator *Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan*, telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang (luncuran 2025)
 - ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTU (luncuran 2025)

- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Alor (luncuran 2025)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya (luncuran 2025)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat (luncuran 2025)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Alor
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Alor
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Kupang
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Ende
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Ende
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Malaka
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Rote Ndao
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Kupang
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo (Luncuran 2026)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur (Luncuran 2026)
- ✓ Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kota Kupang (Luncuran 2026)

SASARAN STRATEGIS 2

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Irigasi dan Meningkatkan Produksi Panen , yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 5

Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator	Satuan	Capaian s/d Tahun 2024	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	36.060,87 Ha 59,77 % Terhadap luas kewenangan provinsi 60.328 Ha	2.000 Ha	56,95 Ha (2,85 %)	36.117,82 Ha (59,87 %)	2.000 Ha	36.117,82 Ha (87,56 %) Terhadap 41.246,21 Ha

Realisasi pencapaian Sasaran 2 : “Meningkatnya ketersediaan Air Baku dalam menunjang ketahanan pangan” dengan ukuran indikator out put adalah Luas Areal Irigasi Fungsional.

Tahun 2024 Target Penanganan Luas Areal Irigasi Fungsional sebanyak 1000 Ha, dan Realisasi Penanganannya sebanyak 913,40 Ha pada 1 (satu) Daerah Irigasi (D.I.) di Kabupaten Ngada. Dengan demikian Capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah mendapat penanganan sampai dengan Tahun 2024 adalah 36.060,87 Ha atau 59,77 % terhadap target Luas Kewenangan Provinsi 60.328 Ha dan atau 87, 43 % terhadap target akhir capaian Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah 41.246,21 Ha.

Di Tahun 2025 Luas Areal Irigasi Fungsional target penanganan 2000 Ha dan Realisasi Penanganannya luas 56,95 Ha, sehingga capaian Luas Areal Irigasi Fungsional yang sudah mendapat penanganan sampai dengan Tahun 2025 adalah 36.117,82 Ha atau 59,87 % terhadap target Luas Kewenangan Provinsi 60.328 Ha dan terhadap target akhir capaian Renstra Tahun 2024 – 2026 adalah 41.246,21 Ha atau 87, 56 %. . Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja belum tercapai secara signifikan dibandingkan dengan target yang direncanakan.

Rendahnya capaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik irigasi, serta kondisi jaringan irigasi eksisting yang memerlukan penanganan teknis lebih kompleks dari perencanaan awal.

Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca, ketersediaan material, serta proses koordinasi lintas kewenangan turut mempengaruhi percepatan pencapaian target luas areal irigasi fungsional.

Sebagai tindak lanjut, upaya perbaikan kinerja akan difokuskan pada penajaman perencanaan teknis, penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan, serta penyesuaian target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran dan kondisi lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan luas areal irigasi fungsional secara bertahap dan berkelanjutan.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Luas areal irigasi fungsional yang mendapat penanganan di Tahun n

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- 1) Keterbatasan anggaran.
- 2) Kondisi jaringan irigasi eksisting yang memerlukan penanganan teknis lebih kompleks dari perencanaan awal
- 3) Faktor eksternal seperti kondisi cuaca, ketersediaan material, serta proses koordinasi lintas kewenangan turut mempengaruhi percepatan pencapaian target luas areal irigasi fungsional.
- 4) Adanya eksploitasi air untuk kebutuhan diluar lahan pertanian.
- 5) Minimnya Biaya Pemeliharaan Daerah Irigasi.

Solusi yang dilakukan :

- 1) Dukungan anggaran yang memadai baik dapat memberi dampak terhadap pemanfaatan Daerah Irigasi.
- 2) Pengawasan dalam Pengelolaan aliran air serta drainase yang efisien, sehingga tingkat kerusakan pada saluran irigasi dapat diminimalisir.
- 3) Perlu adanya penertiban dan pengawasan terhadap sistem-sistem irigasi sehingga dapat terpenuhi ketersediaan air dalam aliri lahan pertanian.

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Cakupan Luar Areal Fungsional telah dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada

Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan :

- ✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket Luncuran DAU-SG TA 2024)

SASARAN STRATEGIS 3

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi”, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 6

Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	67,98 % 1.827,07 (terhadap 2.687,31 KM Jln. Prov)	86,86 % 2.334,20 KM	69,73 % 1.873,861 KM	69,73 % 1.873,861 KM	86,86 % 2.334,20 KM	80,28 % 1.873,89 KM (2.334,20) KM

Realisasi pencapaian Sasaran 3 : “Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Provinsi” dengan ukuran indikator *Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi* adalah sbb:

Persentase Jalan Mantap adalah angka/ukuran yang menunjukkan perbandingan antara panjang jalan mantap provinsi dengan panjang jalan provinsi secara keseluruhan dalam satuan persen. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Panjang jalan provinsi dengan kondisi mantap, yaitu gabungan antara panjang jalan provinsi dengan kondisi baik dan panjang jalan provinsi dengan kondisi sedang. Ukuran Indikator ini terlaksana dalam Program Penyelenggaraan Jalan dengan penanganan ruas jalan kewenangan

provinsi adalah sbb:

Berdasarkan hasil survey Kondisi mantap Jalan Provinsi sampai dengan Tahun 2024 adalah 1.827,07 KM atau telah mencapai 67,98 %. Untuk mendapat Data kondisi jalan mantap maka perlu dilakukan survey kondisi jalan di sepanjang ruas jalan kewenangan provinsi.

Untuk mengukur Indikator Persentase Kemantapan Jalan Provinsi di tahun 2025 ditetapkan target sebesar 86,86% atau sama dengan panjang jalan sebesar 2.334,20 KM. Realisasinya sepanjang 46,92 KM yang terdiri dari jenis pekerjaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Selain pekerjaan Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang dilakukan ada juga penanganan dengan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi baik jalan sepanjang 58,35 KM.

Gambaran kondisi jalan mantap selain berdasarkan realisasi penanganan yang sudah dilakukan tetapi juga berdasarkan data riil hasil survei kondisi jalan mantap yang dilakukan setiap tahunnya, oleh karena setiap tahun dapat terjadi pengurangan kondisi (degradasi) akibat pemanfaatan jalan. Untuk mendukung capaian target tersebut maka Pemerintah sudah berupaya untuk melakukan penanganan terhadap ruas jalan yang masih belum mantap sepanjang 860,24 KM (hasil survei kondisi jalan mantap tahun 2024), akan tetapi dengan ketersediaan anggaran Tahun 2025 maka melalui Program Penyelenggaraan Jalan hanya melakukan penanganan dengan dukungan anggaran Dana Rp. 96,5 M dan belum semua tertangani. Berdasarkan hasil survei data kondisi jalan di Tahun 2024 kondisi jalan tidak mantap sepanjang 860,24 KM. Di Tahun 2025 telah dilakukan survei data kondisi jalan mantap dengan hasil kondisi jalan tidak mantap sepanjang 822,46 KM. Hasil ini merupakan hasil survei data kondisi jalan mantap yang telah dilakukan pada Tahun 2025 dan hasil data survei tersebut sudah termasuk penanganan sepanjang 46,92 KM. Sehingga sampai dengan Tahun 2025 data kondisi jalan mantap adalah sepanjang 1.873,861 KM atau 69,73 %.

Sebagai informasi untuk mendapat data kondisi jalan mantap telah dilakukan kegiatan survey kondisi jalan mantap yang mana penetapan data kondisinya masih melakukan koordinasi penilaian pengukuran kondisi dengan Satker Balai Jalan Nasional Wilayah II Provinsi NTT, sehingga data yang di tampilkan adalah data perhitungan sementara dengan mengukur capaian kondisi jalan mantap di tahun 2024 di tambah dengan penanganan yang dilakukan di Tahun 2025.

Formula Pengukuran indikator ini adalah Jumlah Jalan Mantap yang dikerjakan setiap tahun (dibagi) Total Panjang jalan Provinsi yang harus dimantapkan di kali 100%.

Adapun beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya target 100% mantap jalan antara lain disebabkan karena :

- 1) Ada Paket – paket fisik yang pelaksanaan pekerjaannya mengalami keterlambatan sehingga menjadi paket luncuran di tahun 2026
- 2) Adanya paket pekerjaan yang baru dianggarkan pada periode anggaran perubahan sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan mengalami keterlambatan untuk proses pelaksanaannya
- 3) Kondisi cuaca yang kurang menentu sehingga mempengaruhi progres pekerjaan di lapangan.
- 4) Terdapat ruas -ruas jalan provinsi pada umumnya berada pada daerah – daerah yang tingkat curah hujannya tinggi sehingga pelaksanaan tender harus di mulai pada awal tahun (Bulan Januari)

Solusi yang di lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Apabila adanya paket -paket yang pengaanggarannya dilakukan pada periode perubahan Anggaran DPPA dapat diusulkan dalam pelaksanaan fisik sebaiknya menggunakan multi yeard sehingga tidak terjadi PHK atau luncuran.
- 2) Kedepan Pelaksanaan Tender dimulai lebih awal sehingga tidak berpengaruh terhadap pekerjaan fisik di lapangan dan tidak memasuki musim penghujan.

Intervensi kegiatan yang dilakukan tahun 2025 untuk menjawab capaian indikator Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi, melalui Program Penyelenggaraan Jalan antara lain :

1) Program Penyelenggaraan Jalan

a) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

i) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan (Rekonstruksi Jalan) :

1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa – Batutua
2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih – Panite
3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring – Wairiang

4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing – Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)
5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun – Motamasin (Bts Negara)
6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang – Sikka
7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso
8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi – Kokar
9. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kelinting (Bts. Kab. Belu – Wini Sakato (Bts Negara)
10. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar – Praipaha
11. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelamasi – Sp. Sulamu
12. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite – Kolbano
13. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba – Ege
14. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Cumbi - Iteng
15. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Nggorong – Sp. Terang
16. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala – Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)
17. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai – Bello (Bts. Kab. Kupang)
18. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Poldo – Sp. Patung Merpati
19. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus – Kusa (Bts. Kab. Belu)
20. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) – Mataraben
21. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai – Detukeli
22. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Aeramo – Kaburea (Bts. Kab. Ende)
23. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Dalam Kota Kupang,Cs
24. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) – Riung
25. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wanibesak – Betun

ii) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan :

1. Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokondi - Waitabula
2. Rekonstruksi Ruas Jalan Poma – Bajawa
3. Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki - Oinlasi
4. Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare – Bola

5. Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti – Waiklibang

SASARAN STRATEGIS 4

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) , yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 7

Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator	Satuan	Capaian s/d Tahun 2024	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU)	%	1 Lokasi	18,18% (1) Lokasi	100 % (2) Lokasi	100 % (2) Lokasi	18,18 % (1) Lokasi	25 % (2) Lokasi

Total keseluruhan Lingkungan yang didukung PSU sebanyak 22 Lokasi. Yang telah mendapat intervensi dan didukung dengan PSU sampai tahun 2022 sebanyak 1 Lingkung/Lokasi. Berdasarkan ukuran kinerja selama kurang lebih 3 Tahun sejak Tahun 2024 – 2026 target intervensi penanganannya adalah 5 Lingkungan permukiman berdasarkan target RPD Tahun 2024-2026.

Indikator Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 18,18% (1 lingkungan) terhadap kewenangan target 5 Lingkungan.

Untuk memenuhi Kinerja indikator Presentase Lingkungan yang didukung Prasarana , Sarana dan Utilitas (PSU) telah dilakukan intervensi penanganan pada 2 lingkungan antara yaitu melalui kegiatan penduku ng Pembangunan WC/Sanitasi di Desa Noen Bila Kab. TTS sebanyak 25 buah untuk di manfaatkan oleh 25 rumah tangga miskin dan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan

Kota Kupang, dengan Realisasi 2 lingkungan atau 100 % terhadap intervensi untuk 5 Lingkungan. Angka ini mencerminkan fokus pelaksanaan kegiatan pada lingkungan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi tinggi, sehingga dukungan PSU yang diberikan tetap memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat. Pendekatan berbasis prioritas ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal dalam keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi target secara penuh terhadap kewenangan di 22 Lingkungan/Lokasi dipengaruhi oleh dukungan alokasi anggaran dan luasnya sebaran lingkungan yang membutuhkan dukungan PSU, serta tantangan teknis pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, langkah yang sudah dilakukan dalam pengendalian dan penyesuaian pelaksanaan telah dilakukan untuk memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak yang terukur.

Sebagai tindak lanjut, peningkatan kinerja pada periode berikutnya akan diarahkan pada penajaman perencanaan berbasis kebutuhan lingkungan, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan dukungan pendanaan dan sinergi lintas sektor. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan persentase lingkungan yang didukung PSU secara bertahap dan berkelanjutan.

Masalah atau kendala yang di hadapi :

1. Keterbatasan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap luasnya sebaran lingkungan yang membutuhkan dukungan PSU.
2. Tantangan teknis dilapangan apabila intervensi kegiatan kurang mendapat dukungan dari masyarakat setempat
3. Kondisi iklim yang tidak menentu sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan dan waktu pelaksanaan

Solusi yang akan dilakukan :

1. Dukungan anggaran dan koordinator instansi terkait perlu lebih di lakukan secara intensif
2. Dukungan dari pemerintah setempat dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait sasaran dan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan
3. Langkah pengendalian dan penyesuaian pelaksanaan telah dilakukan untuk memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak yang terukur.

Intervensi kegiatan yang dilakukan tahun 2025 untuk menjawab capaian indikator Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU antara lain :

1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

i. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman :

1. Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS (PRKP);

2. Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang;

SASARAN STRATEGIS 5

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana Tabel III. 8

Tabel III.8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target RENSTRA	Capaian s/d 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	% Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	%	77,69 %	100 %	2.312 kk	73,90 %	100 %	73,90 %

Cakupan Layanan Air Minum Lintas Wilayah Kab/Kota adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat di beberapa wilayah lintas yang dilakukan oleh Suatu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Berdasarkan data kondisi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menyatakan bahwa angka capaian penanganan Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/Kota sebesar 100 %. Tahun 2024 ukuran output kinerja indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota baru bisa memenuhi capaian 77,69 %.

Pada tahun 2025 untuk mengukur indikator kinerja Capaian Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota dengan ukuran target 100 % dapat terwujud pelaksanaannya di Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang dan Kab. Kupang.

Kapasitas produksi terpasang adalah 150 liter/detik, sedangkan kapasitas produksi termamfaatkan saat ini adalah 75 liter/detik untuk kapasitas 1 mesin pompa yang berproduksi atau setara dengan ± 7.500 sambungan rumah yang dapat di suplai kepada masyarakat atau pelanggan.

Pada Tahun 2025 untuk mengukur waktu kerja UPTD SPAM yang dioerasikan selama 10 Jam / Hari maka dari waktu kerja yang di operasikan seharusnya mampu melayani sebanyak 3.129 sambungan rumah akan tetapi realisasinya sebanyak 2.312 sambungan rumah. Sehingga capaian pada Tahun 2025 sebesar 73,90 % dari waktu kerja operasional pada Tahun 2025.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum adanya kerja sama antara Pemerintah Kota (PDAM Kota Kupang), Pemerintah Kab.Kupang (PDAM Kab. Kupang) dengan Pemerintah Provinsi (UPTD SPAM);
2. Belum adanya Reservoir Induk sebagai penyeimbang sehingga pelayanan yang dilakukan sampai dengan saat ini adalah dengan sistem tembak langsung.

Solusi yang diharapkan adalah :

1. Perlu adanya peran Pemerintah Provinsi dalam penyelesaian permasalahan pelayanan air minum di Kabupaten Kupang dan khususnya Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi agar pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi terkait kondisi ini;
2. Perlu adanya Reservoir Induk sebagai penyeimbang agar pelayanan air minum curah dapat dilakukan secara gravitasi selama 1 x 24 jam/hari;

Intervensi kegiatan untuk menjawab capaian indikator Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), antara lain:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota:
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kab/Kota :
 - Pengembangan Jaringan Distribusi Utama di Kota Kupang

SASARAN STRATEGIS 6

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran 6 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, digambarkan dalam Tabel III.9

Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2024			Target RENSTRA	Capaian 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	100 % 23 (Perda 9 + 14 Revisi Dokumen Perda)	86,96	60,87	60,87	86,96	100 % 23 (Perda 9 + 14 Revisi Dokumen Perda)

Menjawab Realisasi pencapaian Sasaran 6 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang, dengan Indikator Peningkatan Presentase Wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RTRW/RUTR dan RDTR.

Sampai dengan Tahun 2024 sudah terdapat sebanyak 9 Dokumen Perda antara lain 1 Dokumen Perda Provinsi, 8 Dokumen Perda Kab/Kota dan 14 Perda RTRW Kabupaten/Kota yang masih dalam proses revisi atau sudah mencapai 100%.

Di tahun 2025 target yang di tentukan sebesar 86,96 % atau 20 dokumen Perda RTRW atau RDTR. untuk menjawab capaian indikator ini perlu di sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota di provinsi NTT saat ini sebanyak 22 Perda;

- Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota setiap lima tahun sekali. Hasil Peninjauan Kembali berupa rekomendasi melakukan Revisi Perda Sebagian atau Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya.
- Saat ini semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT telah melakukan Proses Peninjauan Kembali Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dan rekomendasinya adalah Revisi dengan Pencabutan Perda sebelumnya.
- Perda RTRW Provinsi telah di Perdakan dengan Nomor Perda NTT Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Taa Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.
- Dari 22 Kabupaten/Kota yang melakukan Revisi Perda RTRW dan RTRW Kabupaten/Kota sejak tahun 2018 – 2023, sebanyak 13 Kabupaten telah sampai pada Penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan RDTR yang telah diPerdakan sebanyak 14 RDTR yang berada di 10 Kabupaten antara lain : Kab. Manggarai Barat, Nagekeo, Ende, Alor, Malaka, TTS, Kab. Kupang, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sumba Timur.
- Sampai dengan tahun 2025 sebanyak 14 Kabupaten/Kota telah selesai menyusun Perda RTRW atau baru mencapai 60,87 % sedangkan 9 Kabupaten/Kota masih dalam proses Revisi.

Masalah yang di hadapi antara lain :

- 1) Masih terdapat beberapa catatan penting terkait penyesuaian terhadap dokumen-dokumen (revisi dokumen)
- 2) Adanya kebijakan Sektoral yang juga terus berubah sesuai kepentingan masing-masing sektor sehingga berpengaruh terhadap penetapan kebijakan penataan ruang.
- 3) Belum maksimal percepatan proses Revisi RTRW dalam hal ini terkait Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal dalam proses Penyusunan RTRW (khusus Kab/Kota) dalam hal ini dengan Forum Penataan Ruang Provinsi.

Solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Perlu adanya klinik penyusunan RTRW dengan Kementerian ATR/BPN;
- 2) Perlu adanya pembahasan Pra Lintas Sektorial dengan seluruh Stakholder terkait;
- 3) Dukungan anggaran dalam upaya percepatan penetapan Perda RTRW Kab/Kota.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tahun 2025 melalui program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebesar

Rp. 193.377.808.591,- Pagu anggaran ini termuat DPA Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025.

Berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 maka Realisasi seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2025 ini dianggarkan sebesar Rp. 193.368.808.591,- terdiri dari :

I. Pagu Anggaran

Belanja Operasi sebesar	: Rp. 85.356.028.827,-
Belanja Modal sebesar	: Rp. 108.021.779.764,-

II. Realisasi Anggaran

Belanja Operasi sebesar	: Rp. 63.576.231.894,-
Belanja Modal sebesar	: Rp. 100.648.457.353,-

III. Sisa Anggaran

Belanja Operasi sebesar	: Rp. 21.779.796.933,-
Belanja Modal sebesar	: Rp. 7.364.322.411,-

Dari seluruh pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 terdapat sisa Anggaran oleh karena masih terdapat sisa kegiatan yang menjadi kegiatan luncuran di Tahun 2026.

Uraian realisasi Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT diwujudkan dalam bentuk Program/Kegiatan sbb:

Tabel I +-II.10

REALISASI BELANJA MODAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	PRESENTASE (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.885.514.974	2.966.098.869	99,28
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	820.756.983	773.604.299	45,03
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.004.236.317	1.918.847.200	95,73
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.184.140.570	94.871.459.040	93,76
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	37.753.000	37.684.500	99,81
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.614.480	50.505.000	99,78
7.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	29.863.440	29.858.445	99,98%
TOTAL		108.012.879.764,00	100.648.057.353,00	93,18%

3.5 ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DITETAPKAN

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua (2) yaitu **Efisiensi Sumber Daya Biaya** dan **Sumber Daya Manusia**.

Perhitungan efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase Efisiensi Biaya} &= 100\% - \frac{\text{Real Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \\
 &= 100\% - \frac{108.012.879.764,-}{100.648.057.353,-} \times 100\% \\
 &= 93,18 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan sesuai rumus efisiensi diatas, diperoleh presentase efisiensi biaya yang merupakan sisa anggaran dari total Belanja Modal pada Dinas PUPR Provinsi NTT adalah sebesar Rp. **7.364.322.411** atau sama dengan **6,82 %**. Apabila diperhitungkan berdasarkan pagu anggaran secara keseluruhan pada Dinas PUPR Provinsi NTT adalah Rp. **164.224.689.247,-** atau **84,93 %** dan Sisa Pagu Anggaran sebesar Rp. **29.144.119.344,-** atau **15,07 %**.

Tingkat efisiensi pemanfaatan biaya sangat tergantung pada realisasi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan fisik dilapangan serta pembiayaan lain yang menjadi unsur pendukung pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dan pelaporan kinerja dinas.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2025 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan target RPD dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dan pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026.

Di Tahun 2025 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat disimpulkan bahwa dari 6 Indikator yang terukur sesuai target RPD Provinsi NTT dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (RENSTRA) dapat dikatakan **Berhasil** dengan nilai capaian sebesar **75,90 %**. Dengan rincian kategori sangat berhasil sebanyak 2 Indikator yakni Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan; 1 Indikator dikategorikan berhasil yakni Presentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota; 1 indikator dikategori cukup berhasil yakni dan Peningkatan Presentase wilayah provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR; 2 indikator dikategorikan cukup yakni Luas Areal Irigasi Fungsional dan Presentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi.

Sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maka Realisasi Rata-rata capaian sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar **75,90 %** dan berada dalam kategori **Berhasil**.

Capaian Kinerja ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yakni sebesar **78,63 %**. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh karena :

- Adanya program kegiatan yang memenuhi target dan menyerap anggaran dengan capaian kinerjanya 90-100%;

- Adanya kegiatan yang masih luncuran oleh karena kondisi di lapangan sehingga berpengaruh terhadap progres anggaran;
- Progres penyerapan anggaran belanja modal hampir terserap penuh atau 93,18%;
- Adanya keterbatasan anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

Dengan kondisi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT ini tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi program dan kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama dalam mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran sesuai dengan indikator-indikator pencapaian yang ditetapkan dalam RPJMD Prov NTT Tahun 2025 – 2029 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang baru yaitu Tahun 2025 - 2029, sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai pembangunan infrastruktur dalam menunjang keberlangsungan hidup yang lebih baik kedepannya.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama. Telp.

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI
1	KEPALA BIDANG BINA MARGA	Data Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi telah diverifikasi bersama Bidang Bina Marga
2	KEPALA BIDANG PEMBANGUNANSUMBER DAYA AIR	Meningkatnya Cakupan Iayanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi telah diverifikasi bersama Bidang Pembangunan Sumber Daya Air
3	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya lingkungan yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) telah diverifikasi bersama Bidang Perumahan dan Permukiman
4	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Daerah telah diverifikasi bersama Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5	KEPALA BLUD SPAM	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum layak lintas Kab/Kota telah diverifikasi bersama UPTD BLUD SPAM
6	KEPALA DINAS	Sistematika penyusunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Kupang, Februari 2026

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Dinas,

Frderik Kiuk, ST., M. Eng
Pembina Tk.I/IVb
NIP.19711116200012 1 003

REKAP KONDISI RUAS JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 (AKHIR TAHUN)

Sesuai SK Ruas Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur No. SK 403/KEP/HK/2023

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG SESUAI SK (KM)	PANJANG TIAP KONDISI (KM)				PERSENTASE TIAP KONDISI (%)				PANJANG KATEGORI (KM)		PRESENTASE KATEGORI (%)	
				BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	MANTAP	TIDAK MANTAP	MANTAP (%)	TIDAK MANTAP (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18
A. KOTA KUPANG															
1	5371001 K	Jl. Yos Sudarso	3,89	0,99	2,60	0,30	-	25,45	66,84	7,71	-	3,59	0,30	92,29	7,71
2	5371002 K	Sp. Tiga Terminal LILBK - Sp. Tiga Straat A	2,13	-	1,83	0,30	-	-	85,92	14,08	-	1,83	0,30	85,92	14,08
3	5371003 K	Sp. Patung Sonbai - Sp. Tiga Bundaran Oebutu	5,10	4,20	0,20	0,70	-	82,35	3,92	13,73	-	4,40	0,70	86,27	13,73
4	5371004 K	Jl. Frans Lebu Rava	2,55	2,55	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	0,00
5	5371005 K	Jl. Mesakh Amalo	0,84	0,74	-	0,10	-	88,10	-	11,90	-	0,74	0,10	88,10	11,90
6	5371006 K	Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)	9,74	6,70	2,14	0,70	0,20	68,79	21,97	7,19	2,05	8,84	0,90	90,76	9,24
7	5371007 K	Jl. A. Nisnomi	6,62	3,82	2,40	0,40	0,40	57,70	36,25	6,04	-	6,22	0,40	93,96	6,04
8	5371008 K	Sp. Poldia - Sp. Patung Merpati	8,06	6,76	1,10	0,20	-	83,87	13,65	2,48	-	7,86	0,20	97,52	2,48
9	5371009 K	Jl. Amabi	2,27	2,07	0,20	-	-	91,19	8,81	-	-	2,27	-	100,00	0,00
JUMLAH				27,83	10,47	2,70	0,20	67,55	25,41	6,55	0,49	38,30	2,90	92,96	7,04
B. KABUPATEN KUPANG															
1	5303010	Jl. Dalam K.I. Bolok	1,80	1,80	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	0,00
2	5303011	Linkekar Luar Kota Kupang - Fabelolong	17,40	7,10	4,10	5,80	0,40	40,80	23,56	33,33	2,30	11,20	6,20	64,37	35,63
3	5303012	Oelomin (Bts. Kota Kupang) - Baun	15,10	8,50	1,40	3,10	2,10	56,29	9,27	20,33	13,21	9,90	5,20	65,36	34,64
4	5303013	Baun - Ekam	20,43	1,83	0,10	4,90	13,60	8,96	0,49	23,98	66,37	1,93	18,30	9,45	90,55
5	5303014	Oesao - Buraen	24,48	19,38	5,10	-	-	79,17	20,83	-	-	24,48	-	100,00	0,00
6	5303015	Oekabiti - Oenoro (Bts. Kab. TTS)	55,10	20,10	19,60	5,70	9,70	36,48	35,37	10,34	17,60	39,70	15,40	72,05	27,95
7	5303016	Oelmasi - Sp. Sulamu	27,80	13,30	10,90	3,00	0,40	48,36	39,21	10,79	1,44	24,40	3,40	87,77	12,23
8	5303017	Sp. Sulamu - Barate	13,00	9,00	3,00	0,60	0,40	69,23	23,08	4,62	3,08	12,00	1,00	92,31	7,69
9	5303018	Barate - Manubelon	36,90	29,20	1,10	2,80	3,80	79,13	2,98	7,59	10,30	30,30	6,60	82,11	17,89
10	5303019	Manubelon - Naikilu	36,40	9,40	0,80	11,00	15,20	25,82	2,20	30,22	41,76	10,20	26,20	28,02	71,98
11	5303020	Naikilu - Oenoli (Bts. Negara)	44,30	7,60	0,30	5,40	14,60	27,24	1,08	19,35	52,33	7,90	20,00	28,32	71,68
12	5303021	Netemnanu (Bts. Kab. TTS) - Sp. Noelelo	1,03	1,03	-	-	-	100,00	-	-	-	1,03	-	100,00	0,00
13	5303022	Bokoni - Lelogana	27,30	16,00	3,10	0,10	0,10	92,55	7,00	0,23	0,23	44,10	0,20	99,55	0,45
14	5303023	Hansani - Oesalaen	38,52	41,02	3,30	0,80	18,40	41,59	8,57	2,08	47,77	19,32	19,20	50,16	49,84
JUMLAH				185,46	52,80	43,20	78,70	51,49	14,66	11,99	21,85	238,26	121,90	66,15	33,85
C. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN															
1	5304024	Pollo (Bts. Kab. TTS) - Sp. Panite	3,10	3,10	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	0
2	5304025	Batu Putih - Panite	22,23	9,70	5,93	6,60	-	43,63	26,68	29,69	-	15,63	6,60	70,31	29,69
3	5304026	Panite - Kolbano	47,88	25,36	9,40	8,00	1,10	61,36	19,63	16,71	2,30	38,78	9,10	80,97	19,01
4	5304027	Kolbano - Bokong	51,76	29,28	18,10	6,50	1,90	48,80	34,97	12,56	3,67	43,36	8,40	83,77	16,23
5	5304028	Bokong - Skinu (Bts. Kab. Malaka)	9,15	1,80	4,90	2,05	0,40	19,67	53,55	22,40	4,37	6,70	2,45	73,22	26,78
6	5304029	Soe - Kapan	16,80	16,80	-	-	-	100,00	-	-	-	16,80	-	100,00	0,00
7	5304030	Kapan - Nenas	25,75	8,20	5,40	0,80	11,35	31,84	20,97	3,11	44,08	13,60	12,15	52,82	47,18
8	5304031	Nenas - Nuapain (Bts. Kab. Kupang)	20,30	0,97	5,70	3,20	19,33	4,78	24,33	13,66	95,22	0,97	19,33	4,78	95,22
9	5304032	Kapan - Patumputu (Bts. Kab. TTU)	23,43	5,13	5,70	3,20	9,40	21,90	24,33	13,66	40,12	10,83	12,60	46,22	53,78
10	5304033	Sp. Nika-nika - Oenlesi	19,45	4,80	6,95	4,50	3,20	24,68	35,33	23,14	16,45	11,75	7,70	60,41	39,59
11	5304034	Oenlesi - Bokong	30,92	18,20	2,32	0,40	10,00	58,36	7,50	1,29	32,34	20,52	10,40	66,36	33,64
JUMLAH				270,77	123,34	58,70	32,05	45,55	21,68	11,84	20,93	182,04	88,73	67,23	32,77
D. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA															
1	5305035	Lenon (Bts. Kab. TTS) - Kefamenanu	36,85	12,55	13,10	8,30	2,90	34,06	35,55	22,52	7,87	25,65	11,20	69,61	30,39
2	5305036	Edan - Sp. Saichau	3,36	0,08	1,095	0,955	3,23	1,49	20,43	17,82	60,26	1,18	4,185	21,92	78,08
3	5305037	Maubesi - Sp. Maruanas	33,48	0,90	4,10	24,78	3,70	2,69	12,25	74,01	11,05	5,00	28,48	14,93	85,07
4	5305038	Kelintine (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara)	47,83	23,20	14,43	10,00	0,20	48,51	30,17	20,91	0,42	37,63	10,20	78,67	21,33
JUMLAH				123,52	36,73	32,725	44,035	29,74	26,49	35,65	8,12	69,46	54,065	56,23	43,77
E. KABUPATEN BELU															
1	5306039	Teun (Bts. Kab. Malaka) - Hallulik	16,60	5,30	2,60	5,30	3,40	31,93	15,66	31,93	20,48	7,90	8,70	47,59	52,41
2	5306040	Atambua - Sp. Manleten	13,37	13,17	-	-	0,20	98,50	-	-	1,50	13,17	0,20	98,50	1,50
3	5306041	Sp. Dualasi - Weluli	10,37	9,00	1,20	0,07	0,10	86,79	11,57	0,68	0,96	10,20	0,17	98,36	1,64
4	5306042	Lakatchan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	5,25	5,25	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	0,00
5	5306043	Sp. Bertuli - Teuk Gurita	6,14	5,44	0,40	-	0,30	88,60	6,51	-	4,89	5,84	0,30	95,11	4,89
JUMLAH				51,73	38,16	4,20	5,37	4,00	73,77	10,38	7,73	42,36	9,37	81,89	18,11
F. KABUPATEN MALAKA															
1	5321044	Lamea (Bts. Kab. TTS) - Wambesak	10,18	0,30	7,18	2,60	0,10	2,95	70,53	25,54	0,98	7,48	2,70	73,48	26,52
2	5321045	Wambesak - Betun	25,00	9,70	13,00	2,20	0,10	38,80	8,80	17,82	0,40	22,70	2,30	90,80	9,20
3	5321046	Betun - Motamasin (Bts. Negara)	30,06	8,20	10,26	9,50	2,10	27,28	34,13	31,60	6,99	18,45	1,60	61,41	38,59
4	5321047	Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	20,57	11,67	1,90	3,20	3,80	56,73	9,23	15,36	18,47	13,57	7,00	63,97	36,03
JUMLAH				85,81	29,87	32,34	17,50	6,10	34,81	37,69	7,11	62,21	23,60	72,50	27,50

G. KABUPATEN ROTE NDAO															
1	5314048	Baa - Batutua	27.82	5.10	8.40	8.80	5.52	18.33	30.19	31.63	19.84	13.50	14.32	48.53	51.47
		JUMLAH	27.82	5.10	8.40	8.80	5.52	18.33	30.19	31.63	19.84	13.50	14.32	48.53	51.47
H. KABUPATEN SABU RAJUA															
1	5320049	Saba - Ege	15.82	8.30	2.90	2.00	2.62	18.33	52.47	12.64	16.56	11.20	4.62	70.80	29.20
2	5320050	Seba - Terlu	11.10	9.10	1.70	-	0.30	81.98	15.32	-	2.70	10.80	0.30	97.30	2.70
3	5320051	Lodemani - Lobodeti	16.61	11.61	1.30	1.60	2.10	69.90	7.83	9.63	12.64	12.91	3.70	77.72	22.28
		JUMLAH	43.53	29.01	5.90	3.60	5.02	66.64	13.55	8.27	11.53	34.91	8.62	80.20	19.80
I. KABUPATEN ALOR															
1	5307052	Kalabahi - Kokar	29.85	24.45	0.20	0.30	4.90	81.91	0.67	1.01	16.42	24.65	5.20	82.58	17.42
2	5307053	Kokar - Mali	28.30	19.04	-	0.08	9.18	67.28	-	0.28	32.44	19.04	9.26	67.28	32.72
3	5307054	Watutuku (Sp. Mola) - Mataraben	37.20	34.60	0.60	0.40	1.90	93.01	1.61	0.27	5.11	35.20	2.00	94.62	5.38
4	5307055	Baranusa - Puntaru	13.30	0.40	2.50	0.40	10.00	3.01	18.80	3.01	75.19	2.90	10.40	21.80	78.20
5	5307056	Beangonong - Boiang	23.20	3.80	-	-	19.40	16.38	-	-	83.62	3.80	19.40	16.38	83.62
		JUMLAH	131.85	82.29	3.30	0.88	45.38	62.41	2.50	0.67	34.42	85.59	46.26	64.91	35.09
J. KABUPATEN SUMBA TIMUR															
1	5302057	Sp. Mohubukul - Lumbung	18.95	7.046	1.498	6.897	3.509	37.18	7.91	36.40	18.52	8.54	10.41	45.09	54.91
2	5302058	Melolo - Kananggar	49.05	37.10	0.90	0.10	10.95	75.64	1.83	0.20	22.32	38.00	11.05	77.47	22.53
3	5302059	Kananggar - Sp. Aukakechok	13.20	1.20	2.60	0.40	9.00	9.09	19.70	3.03	68.18	3.80	9.40	28.79	71.21
4	5302060	Sp. Aukakechok - Baing	48.81	7.81	4.60	0.20	36.20	16.00	9.42	0.41	74.17	12.41	36.40	25.43	74.57
5	5302061	Sp. Aukakechok - Sp. Lailunggi	32.55	10.50	11.60	10.45	32.26	35.64	-	-	32.10	22.10	10.45	67.90	32.10
6	5302062	Sp. Lailunggi - Malabar	42.66	4.55	4.55	3.40	34.75	10.69	7.97	9.97	81.34	4.56	38.10	10.69	89.31
7	5302063	Malabar - Traipaha	53.33	4.45	16.73	4.50	27.65	8.34	31.37	8.44	31.85	21.18	32.15	39.71	60.29
		JUMLAH	258.55	68.11	42.49	15.50	132.46	26.34	16.43	5.99	51.23	110.59	147.96	42.77	57.23
K. KABUPATEN SUMBA TENGAH															
1	5316064	Weelun (Bts. Kab. Sumba Barat) - Mamboro	23.70	6.60	12.00	3.90	1.20	27.85	50.63	16.46	5.06	18.60	5.10	78.48	21.52
		JUMLAH	23.70	6.60	12.00	3.90	1.20	27.85	50.63	16.46	5.06	18.60	5.10	78.48	21.52
L. KABUPATEN SUMBA BARAT															
1	5301065	Waikabubak - Tana Rara (Bts. Kab. Sumba Tengah)	13.78	10.20	1.80	1.58	0.20	74.02	13.06	11.47	1.45	12.00	1.78	87.08	12.92
2	5301066	Waikabubak - Wanokaka	14.93	6.10	3.70	2.73	2.40	40.86	24.78	18.29	16.08	9.80	5.13	65.64	34.36
3	5301067	Sp. Padedeweri - Sp. Patiala	15.22	4.40	8.62	1.60	0.60	28.91	56.64	10.51	3.94	13.02	2.20	85.55	14.45
4	5301068	Sp. Patiala - Wetaria (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	31.73	17.44	1.80	2.48	10.01	54.96	5.67	7.82	31.55	19.24	12.49	60.64	39.36
		JUMLAH	75.66	38.14	15.92	8.39	13.21	50.41	21.04	11.09	17.46	54.06	21.60	71.45	28.55
M. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA															
1	5317069	Karang Indah (Bts. Kab. Sumba Barat) - Bondokodi	22.50	21.10	0.30	1.10	-	93.78	1.33	4.89	-	21.40	1.10	95.11	4.89
2	5317070	Bondokodi - Waibabula	32.88	27.319	2.80	2.561	0.200	83.09	8.52	7.79	0.61	30.12	2.76	91.60	8.40
3	5317071	Kadamatia - Ketewer	15.25	12.55	1.90	0.80	-	82.30	12.46	5.25	-	14.45	0.80	94.75	5.25
		JUMLAH	70.63	60.97	5.00	4.46	0.20	86.32	7.08	6.32	0.28	65.97	4.66	93.40	6.60
N. KABUPATEN MANGGARAI BARAT															
1	5315072	Sp. Ngorang - Sp. Terang	32.90	30.10	2.08	0.10	0.62	91.49	6.32	0.30	1.88	32.18	0.72	97.81	2.19
2	5315073	Sp. Terang - Sp. Noa	23.40	21.60	1.40	0.10	0.30	92.31	5.98	0.43	1.28	23.00	0.40	98.29	1.71
3	5315074	Sp. Noa - Wontong (Bts. Kab. Manggarai)	25.20	23.98	0.10	0.10	1.12	95.16	0.40	-	4.44	24.08	1.12	95.56	4.44
4	5315075	Sp. Noa - Golowetu (Bts. Kab. Manggarai)	23.30	11.65	2.48	8.10	1.07	50.00	10.64	34.76	4.59	14.13	9.17	60.64	39.36
		JUMLAH	104.80	87.33	6.06	8.30	3.11	83.33	5.78	7.92	2.97	93.39	11.41	89.11	10.89
O. KABUPATEN MANGGARAI															
1	5313076	Ngalak (Bts. Kab. Manggarai Barat) - Kedindi	30.30	8.828	3.922	17.55	-	29.14	12.94	57.92	-	12.75	17.55	42.08	57.92
2	5313077	Koo - Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai Timur)	0.60	0.60	-	-	-	100.00	-	-	-	0.60	100.00	0.00	-
3	5313078	Sp. Cimbi - Iteng	40.72	18.363	7.88	4.60	9.877	45.10	19.35	11.30	24.26	26.24	14.48	64.45	35.55
		JUMLAH	71.62	27.79	11.80	22.15	9.88	38.80	16.48	30.93	13.79	39.59	32.03	55.28	44.72
P. KABUPATEN MANGGARAI TIMUR															
1	5319079	Wae Gongger (Bts. Kab. Manggarai) - Pota	46.30	14.21	13.59	1.50	17.00	30.69	29.35	3.24	36.72	27.80	18.50	60.04	39.96
2	5319080	Pota - Labuan Kelambu (Bts. Kab. Ngada)	35.00	7.18	8.33	4.26	15.23	20.51	23.80	12.17	43.51	15.51	19.49	44.31	55.69
3	5319081	Bealung - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)	73.82	33.59	9.40	3.54	27.29	45.50	12.73	4.80	36.97	42.99	30.83	58.24	41.76
4	5319082	Borong - Nceang	24.52	23.32	1.20	-	-	95.11	4.89	-	-	24.52	-	100.00	0.00
5	5319083	Sp. Dangka Mangkang - Dampok	50.83	20.47	6.20	3.11	21.05	40.27	12.20	6.12	41.41	26.67	24.16	52.47	47.53
		JUMLAH	230.47	98.77	38.72	12.41	80.57	42.86	16.80	5.38	34.96	137.49	92.98	59.66	40.34
Q. KABUPATEN NGADA															
1	5312084	Mbazang (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Sp. Waepana	35.92	10.10	8.92	12.90	4.00	28.12	24.83	35.91	11.14	19.02	16.90	52.95	47.05
2	5312085	Malauza - Maumbawa (Bts. Kab. Nagekco)	19.91	5.71	13.10	1.10	-	28.68	65.80	5.52	18.81	18.81	1.10	94.48	5.52
3	5312086	Labuan Kelambu (Bts. Kab. Manggarai Timur) - Rihun	25.06	12.26	9.00	2.40	1.40	48.92	35.91	9.58	5.59	21.26	3.80	84.84	15.16
4	5312087	Rihun - Poma	30.22	20.32	7.30	2.60	-	67.24	24.16	8.60	-	27.62	2.60	91.40	8.60
5	5312088	Poma - Bajawa	37.84	14.54	8.20	12.30	2.80	38.42	21.67	32.51	7.40	22.74	15.10	60.10	39.90
6	5312089	Kruing - Lengkosambi (Bts. Kab. Nagekco)	17.90	11.00	6.70	0.20	-	61.45	37.43	3.12	-	17.70	0.20	98.88	1.12
		JUMLAH	166.85	73.93	53.22	31.50	8.20	44.31	31.90	18.88	4.91	17.15	39.70	76.21	23.79

R. KABUPATEN NAGEKEO															
1	5318090	Nggolemo [Bts. Kab. Ngada] - Danga	18,80	15,70	2,60	0,50	-	83,51	13,83	2,66	-	18,30	0,50	97,34	2,66
2	5318091	Matapokot - Aerano	6,66	5,16	1,20	-	0,30	77,48	18,02	-	4,50	6,36	0,30	95,50	4,50
3	5318092	Aerano - kaburea [Bts. Kab. Ende]	34,50	17,00	13,90	2,40	1,20	49,28	40,29	6,96	3,48	30,90	3,60	89,57	10,43
4	5318093	Maumbawa [Bts. Kab. Ngada] - Sp. Gako	29,72	15,70	12,32	1,10	0,60	52,83	41,45	3,70	2,02	28,02	1,70	94,28	5,72
		JUMLAH	89,68	53,56	30,02	4,00	2,10	59,72	33,47	4,46	2,34	83,58	6,10	93,20	6,80
S. KABUPATEN ENDE															
1	5311094	Kaburea [Bts. Kab. Nagekeo] - Kanakolo	37,24	16,14	11,40	5,10	4,60	43,34	30,61	13,69	12,35	27,54	9,70	73,95	26,05
2	5311095	Detusoko - Maurole	48,65	14,75	20,50	10,40	3,00	30,32	42,14	21,38	6,17	35,25	13,40	72,46	27,54
3	5311096	Maurole - koro [Bts. Kab. Sikka]	41,15	10,90	22,05	5,30	2,90	26,49	53,58	12,88	7,05	32,95	8,20	80,07	19,93
4	5311097	Wologai - Detukeli	15,35	10,35	4,70	0,30	-	67,43	30,62	1,95	-	15,05	0,30	98,05	1,95
5	5311098	Ende - Nuabosi	7,85	4,40	0,65	1,50	1,30	56,05	8,28	19,11	16,56	5,05	2,80	64,33	35,67
		JUMLAH	150,24	56,54	59,30	22,60	11,80	37,63	39,47	15,04	7,85	115,84	34,40	77,10	22,90
T. KABUPATEN SIKKA															
1	5310099	Koro [Bts. Kab. Ende] - Maumere	36,58	16,98	19,10	0,20	0,30	46,42	52,21	0,55	0,82	36,08	0,50	98,63	1,37
2	5310100	Hepang - Sikka	8,65	5,35	-	2,90	0,40	61,85	-	33,53	4,62	5,35	3,30	61,85	38,15
3	5310101	Waepate - Bola	20,00	13,10	-	6,20	0,70	65,50	-	31,00	3,50	13,10	6,90	65,50	34,50
4	5310102	Napungmati - Mudajebak [Bts. Kab. Flores Timur]	25,70	21,80	-	0,30	3,60	84,82	-	1,17	14,01	21,80	3,90	84,82	15,18
		JUMLAH	90,93	57,23	19,10	9,60	5,00	62,94	21,01	10,56	5,50	76,33	14,60	83,94	16,06
U. KABUPATEN FLORES TIMUR															
1	5309103	Mudajebak [Bts. Kab. Sikka] - Waurunu	17,62	14,72	0,80	1,30	0,80	83,54	4,54	7,38	4,54	15,52	2,10	88,08	11,92
2	5309104	Larantuka - Watowiti	5,44	5,44	-	-	-	100,00	-	-	-	5,44	-	100,00	0,00
3	5309105	Watowiti - Waiwera	25,00	16,60	1,20	2,00	5,20	66,40	4,80	8,00	20,80	17,80	7,20	71,20	28,80
4	5309106	Waiwera - Waiwera	23,45	22,15	1,20	0,10	-	94,46	5,12	0,43	-	23,35	0,10	99,57	0,43
5	5309107	Waiwera - Sp. Wuniana	13,10	12,80	0,30	-	-	97,71	2,29	-	-	13,10	-	100,00	0,00
6	5309108	Sp. Kulanang - Sagu	10,31	3,41	1,00	-	5,90	33,07	9,70	-	57,23	4,41	5,90	42,77	57,23
7	5309109	Kitaebang - Lamakera	46,65	35,65	3,40	0,90	6,70	76,42	7,29	1,93	14,36	39,05	7,60	83,71	16,29
		JUMLAH	141,57	110,77	7,90	4,30	18,60	78,24	5,58	3,04	13,14	118,67	22,90	83,82	16,18
V. KABUPATEN LEMBATA															
1	5308110	Brangaurang - waurang	20,52	15,92	0,90	1,50	2,20	77,58	4,39	7,31	10,72	16,82	3,70	81,97	18,03
2	5308111	Waijarang - wulandohi	55,70	33,40	9,10	-	13,20	59,96	16,34	-	23,70	42,50	13,20	76,30	23,70
		JUMLAH	76,22	49,32	10,00	1,50	15,40	64,71	13,12	1,97	20,20	59,32	16,90	77,83	22,17
		TOTAL	2.687,31	1.346,85	520,37	306,74	513,36	50,12	19,36	11,41	19,10	59,32	16,90	77,83	22,17

Total Ruas Jalan Provinsi NTT Sebangak 111 Ruas

MANTAP 2025		TIDAK MANTAP	
(Kilometer)		2025	
Presentase (%)	1.867,21	69,48	30,52

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PUPR Provinsi NTT

[Signature]

Frederik Khuk, ST., M. Eng.
NIP. 19711110 200012 1 003

Catatan :

Data ini merupakan hasil survey kondisi pada akhir tahun 2025 dan bersifat tentatative karena akan dilakukan verifikasi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur dan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PU pada saat asistensi data teknis yang akan menjadi data final pada aplikasi SIPDJD

TABEL 3.1.1
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI/OUTPUT	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PUPR NTT	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; - Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; - Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; - Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;	a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	35.000.000 (Pagu Perencanaan) 75.000.000 (Pagu Pengawasan) 100.000.000 100.000.000 100.000.000	34.965.000 (99,9%) (Nilai Kontrak) Output: Dokumen perencanaan pengembangan SPAM di lokasi prioritas penanganan stunting Kota Kupang 74.938.875 (99,91) (Nilai Kontrak) Output: Dokumen pengawasan pengembangan SPAM di lokasi prioritas penanganan stunting Kota Kupang 99.955.000 (99,95%) (Nilai Kontrak) Output: Dokumen perencanaan pengembangan SPAM di lokasi prioritas penanganan stunting Kangae, Sikka 99.955.000 (99,96%) (Nilai Kontrak) Output: Dokumen perencanaan PSU SPAM Sekolah Rakyat Fatukoa Kota Kupang 99.900.000 (99,9%) (Nilai Kontrak) Output: Dokumen perencanaan PSU Jalan Lingkungan Sekolah Rakyat Fatukoa Kota Kupang	target/sasaran perencanaan terlalu menyebar wilayah pelayanan SPAM terlalu luas debit sumber air tidak stabil -	mengerahkan tenaga internal (swadaya) untuk membantu proses verifikasi konstruksi dibagi dalam dua tahapan mengembangkan jaringan dari perpipaan yang sudah ada -	

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR NTT	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; - Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; - Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; - Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.	b.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
			1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten. Kota	100.000.000 (Pagu-Konsultasi Perencanaan)	99.000.000 (99%) (Nilai Kontrak) Output: 1 dokumen studi kelayakan SPAM Regional Linamutu Lintas Kab. TTS-Kab. Kupang	Kedalaman pembahasan laporan	menyarankan agar lebih detail	
					100.000.000 (Pagu-Konsultasi Perencanaan)	99.955.000 (99,95%) (Nilai Kontrak) Output: 1 dokumen studi kelayakan SPAM Regional Nangaboa Lintas Kab. Ende-Kab. Nagekeo	-	-	
	Dinas PUPR NTT	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; - Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; - Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; - Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.	b.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			1.	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100.000.000 (Pagu-Konsultasi Perencanaan)	99.859.000 (99,86%) (Nilai Kontrak) Output: 1 dokumen studi kelayakan RSKD Jiwa Naimata	-	-	
					100.000.000 (Pagu-Konsultasi Perencanaan)	99.758.000 (99,76%) (Nilai Kontrak) Output: 1 dokumen studi kelayakan Gelanggang Remaja Oepoi	karena keterbatasan anggaran pengujian struktur tidak dapat dilaksanakan secara mendetail	pengujian dilaksanakan sesuai yang dibutuhkan	

Kepala Bidang Cipta Karya,



Daniel W. Foenay, S.T., M.T.
NIP.: 197801212003121003



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
JL. BASUKI RAHMAT NO. 1, GEDUNG A KANTOR GUBERNUR PERTAMA - KUPANG

LUAS DAERAH IIRIGASI KEWENANGAN PROVINSI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO.	NAMA IIRIGASI	LOKASI		LUAS POTENSIAL (Ha)	KET
		KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA		
1.	D.I ALAS	Kobalima Timur	Malaka	94,00	
2.	D.I AROKI	Biboki Tanpah, Biboki Utara, Laenmanen, Raimanuk	TTU	777,00	
3.	D.I BATU PUTIH/OEBOBO	Takari, Batu Putih	TTS / Kab. Kupang	227,00	
4.	D.I BILIUANA	Noemuti, Polen, Miomafo Barat	TTS	78,00	
5.	D.I CANCAR	Ruteng, Satar Mese	Manggarai	709,00	
6.	D.I ENORAIN	Amarasi Timur	TTU	73,00	
7.	D.I FATU BESI	Tasifeto Timur	Belu	178,00	
8.	D.I GANGGONG	Riung	Manggarai Barat	462,00	
9.	D.I GOLOWOI	Cibal Barat, Rahong Utara	Manggarai Barat	301,00	
10.	D.I HASFUIK	Kakuluk Mesak, Biboki Anleu	TTU	656,00	
11.	D.I KOLEZIA	Magepanda	Sikka	230,00	
12.	D.I KOLIDOKI	Amabi Oefeto, Kupang Timur, Fatuleu	Kupang	804,00	
13.	D.I KONGA	Titehena, Wulanggitang	Flores Timur	175,00	
14.	D.I LOLI	Loli, Kota Waikabubak	Sumba Barat	671,00	
15.	D.I LUWURWETON	Riung Barat	Ngada	376,00	
16.	D.I MALATAWA	Bajawa Utara, Riung Barat	Ngada	766,00	
17.	D.I MALAWITU	Boawae	Nagekeo	1.224,00	
18.	D.I MANGILI	Pahungga Lodu	Sumba Timur	983,00	
19.	D.I MANUBULU	Rote Tengah	Rote Ndao	560,00	
20.	D.I MATAIYANG	Lewa, Lewa Tidahu	Sumba Timur	1.216,00	
21.	D.I MATALIKU	Loura	Sumba Barat Daya	438,00	
22.	D.I MAUBUSA	Tasifeto Timur	Belu	483,00	
23.	D.I MELOLO	Umalulu	Sumba Timur	598,00	
24.	D.I NETENMANU	Amfoang Timur	Kupang	684,00	
25.	D.I NUAKUA	Wolomeze	Ngada	183,00	
26.	D.I OBOR	Tasifeto Barat, Raimanuk	Belu	701,00	
27.	D.I OEVELO	Amanuban Selatan	TTS	370,00	
28.	D.I PONU	Biboki Anleu	TTU	843,00	
29.	D.I SATAR LENDA	Satar Mese Barat	Manggarai	1.193,00	
30.	D.I WAE CES 1-4	Langke Rembong, Wae Ri'i, Cibal	Manggarai	1.990,00	
31.	D.I WAE GANGGANG	Macang Pacar	Manggarai Barat	438,00	
32.	D.I WAE MOKEL I, II	Kotak Omba, Borong	Manggarai Timur	715,00	
33.	D.I WAE PAKU	Sanonggoang	Manggarai Barat	300,00	
34.	D.I WAE TIWO LAWOW	Lembor Selatan	Manggarai Barat	0,00	
35.	D.I WAEKELOH SAWAH	Wewewa Timur	Sumba Barat Daya	863,00	
36.	D.I WAERACANG	Sanonggoang	Manggarai Barat	277,00	
37.	D.I WAERANA	Kotak Omba, Elar Selatan	Manggarai Timur	330,00	
38.	D.I WAI MATAN BOTO	Nagawutung, Omesuri	Lembata	131,00	
39.	D.I WAIKELAK	Titehena, Demon Pagong	Flores Timur	6,00	
40.	D.I WAIWADAN	Adonara Barat	Flores Timur	99,00	
41.	D.I WANOKAKA	Wanokaka	Sumba Barat Daya	831,00	
42.	D.I WELIMAN	Weliman, Malaka Barat	Malaka	1.089,00	
JUMLAH				23.122,00	

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Frumensius A. P. in, ST. M.Si
NIP. 19780717 201001 1 015

PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI/OUTPUT	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air	A. PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan : 1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.390.000.000,00	Rp. 4.655.000.000,00 (86,36%) 1. Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya sejumlah 17 Titik di 12 Kabupaten 2. Tersedianya Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya sejumlah 17 Titik di 12 Kabupaten 3. Tersedianya Jasa Survei Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya sejumlah 17 Titik di 12 Kabupaten 4. Terlaksananya Pemasangan Water Meter Pada Sumber Air Permukaan di 2 Kabupaten 5. Tersedianya Jasa Pengawasan Pemasangan Water Meter Pada Sumber Air Permukaan di 2 Kabupaten 6. Terlaksananya SID Embung Irigasi 1 Buah di Kab. Timor Tengah Utara	Pada saat Pelaksanaan Pengeboran Pada kedalaman tertentu Adanya Formasi tidak stabil (tanah lempung dominan pasir dan batuan lapuk) berakibat dinding lubang bor mudah runtuh (longsor) sehingga menyulitkan pengeboran lanjutan akibat lubang bor tertimbun, pipa bor sulit diangkat, kecepatan mesin bor melambat atau terhenti, mengakibatkan membutuhkan waktu proses pengeboran sehingga tidak sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan	Dibutuhkan Penambahan Waktu Pekerjaan dan Paket Pekerjaan Tersebut di Luncurkan	
			Peratura Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi Permen PU No. 33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan P3A, GP3A, IP3A Permen PU No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Irigasi	2. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.645.356.350,00	Rp. 883.204.300,00 (53,68%) 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket Luncuran DAU-SG TA 2024) 2. SID Daerah Irigasi (D.I.) Cancar Sub. D.I. Wae Palo di Kab.Manggarai 3. SID Daerah Irigasi (D.I.) Satar Lenda Sub. D.I. Wae Laru di Kab.Manggarai 4. SID Daerah Irigasi (D.I.) Wae Paku (Sub D.I. Wae Ose) di Kab. Manggarai Barat 5. SID Daerah Irigasi (D.I.) Wae Paku (Sub D.I. Wae Cecu) di Kab. Manggarai Barat 6. SID Daerah Irigasi (D.I.) Loli (Sub D.I. Kuritepe) di Kab. Sumba Barat 7. SID Daerah Irigasi (D.I.) Loli (Sub D.I. Kuritepe) di Kab. Sumba Barat 8. SID Daerah Irigasi (D.I.) Weliman (Ruas Kanan) di Kab. Malaka	1. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi mengalami kendala teknis di lapangan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, 2. Pemeliharaan dan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan berkala Daerah irigasi terkendala oleh DPPA yang terbit terlambat sehingga menyebabkan kekurangan waktu untuk melaksanakan pekerjaan 3. Pelaksanaan Pekerjaan SID Daerah irigasi terkendala dengan keterbatasan dan kurang akuratnya data hidrologi (data hujan) dan klimatologi, sehingga menyulitkan dalam analisis perencanaan	1. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendala teknis yang terjadi dan Mengubah atau menyesuaikan metode kerja agar sesuai dengan kondisi lapangan aktual serta paket tersebut di luncurkan 2. Melakukan Percepatan proses persiapan teknis sejak awal tahun, penyusunan jadwal kerja yang lebih efisien, penetapan skala prioritas kegiatan, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dan tepat waktu. 3. Menggunakan data pos hujan SHIKA dari BBWS NT II atau menggunakan data satelit dari GSMaP yang sudah terkalibrasi	

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Frumensius A. Paju, ST, M.Si
NIP. 19780717 201001 1 015

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
BAB VI RANGKUMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
A. PERMASALAHAN					
1. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
1.	Tingkat Ketersediaan air baku yang masih rendah dalam upaya mendukung ketahanan pangan/ketahanan air disebabkan jumlah sarana penyiapan air baku yang dibangun sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan sehingga masih diperlukan peningkatan anggaran. Dalam mengoptimalkan nilai manfaat sarana yang sudah terbangun perlu adanya peningkatan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan, peningkatan kualitas sistem. Pengelolaan, operasi dan pemeliharaan pada sarana yang terbangun.	Tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya tingkat ketersediaan air baku dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan air meliputi penyusunan perencanaan pengembangan sarana air baku secara terpadu dan berbasis kebutuhan rill wilayah, peningkatan dan penajaman alokasi anggaran pembangunan sarana air baku secara bertahap, optimalisasi pemanfaatan sarana yang telah terbangun melalui peningkatan kualitas pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan, serta penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait. Selain itu, diperlukan pemanfaatan data dan teknologi pendukung, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola, serta pemantauan dan evaluasi kinerja sarana secara berkala agar ketersediaan air baku dapat meningkat secara berkelanjutan dan mampu mendukung ketahanan pangan serta ketahanan air secara efektif.	Masalah yang harus diselesaikan adalah rendahnya ketersediaan dan keandalan air baku akibat terbatasnya jumlah dan kapasitas sarana penyiapan air baku, belum optimalnya pemanfaatan sarana yang telah terbangun, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kurang memadainya pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
2.	Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik masih rendah. Capaian sampai tahun 2024 total luas daerah irigasi dalam kondisi baik aru mencapai : 45.139 Ha (70%) dari total luas irigasi : 60.328 Ha yang menjadi kewenangan provinsi, berarti masih ada keluasaan kurang lebih : 15.189 Ha (30%) luas lahan potensial belum optimal termanfaat. Hal ini akibat keterbatasan anggaran 23 untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi sehingga terjadinya penurunan kondisi jaringan yang ada. Disamping terbatasnya anggaran untuk meningkatkan kondisi jaringan irigasi. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan pangan di NTT.	Tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya luas daerah irigasi dalam kondisi baik antara lain adalah meningkatkan alokasi dan efektivitas anggaran operasi dan pemeliharaan irigasi secara berkelanjutan, disertai dengan penetapan prioritas penanganan pada jaringan irigasi yang mengalami kerusakan sedang dan berat. Selain itu, perlu dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi secara bertahap berbasis kondisi teknis dan manfaat layanan, penguatan kelembagaan pengelola irigasi termasuk peran petani pemakai air, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut perlu didukung dengan sistem pemantauan dan evaluasi kondisi jaringan secara berkala agar fungsi irigasi dapat dipulihkan dan dipertahankan secara optimal dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Masalah yang harus diselesaikan adalah masih kurangnya infrastruktur penunjang pada daerah irigasi akibat keterbatasan anggaran operasi, pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi, serta peningkatan jaringan irigasi, yang menyebabkan sebagian lahan irigasi potensial belum termanfaatkan secara optimal dan berpotensi menghambat upaya peningkatan produksi serta ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
3.	Penyajian dan kelengkapan laporan sesuai format yang tersedia masih perlu pembenahan dan dilengkapi untuk memudahkan dalam mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan.	Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menyempurnakan dan mendetailakan format laporan, melengkapi data dan indikator kinerja, serta memperkuat verifikasi dan pengendalian internal agar laporan lebih sistematis, akurat, dan mudah dievaluasi.	Masalah yang harus diselesaikan adalah belum tertib dan belum standarnya penyajian laporan, ditandai dengan ketidaksesuaian format, ketidaklengkapan data dan indikator kinerja, serta lemahnya proses verifikasi dan pengendalian internal, sehingga menyulitkan evaluasi kinerja program dan kegiatan.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
4.	Tidak terlaksananya salah satu kegiatan pengendalian banjir / pengamanan tanggul dapat berakibat terancamnya beberapa infrastruktur dan pemukiman yang terletak pada daerah rawan banjir maupun abrasi.	Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan pengamanan tanggul pada wilayah rawan, meningkatkan dukungan anggaran, serta melakukan koordinasi lintas sektor dan pemantauan kondisi tanggul secara berkala guna mengurangi risiko kerusakan infrastruktur dan ancaman terhadap permukiman.	Masalah yang harus diselesaikan adalah belum terlaksananya sebagian kegiatan pengendalian banjir atau pengamanan tanggul, yang meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur serta mengancam keselamatan permukiman pada wilayah rawan banjir dan abrasi.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	

2.	Dalam rangka mendukung ketahanan air dengan ketersediaan air baku yang memadai, air untuk pertanian, peternakan, maupun kebutuhan domestik/air bersih, perlu adanya tambahan jumlah embung kecil dan irigasi terbangun.	Untuk menindaklanjuti rencana penambahan embung kecil dan perluasan irigasi demi ketahanan air dan pangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pembangunan fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan manajemen sumber daya yang tepat. Berikut adalah tindak lanjut yang harus dilakukan: 1. SID (SID - Survey, Investigation, and Design) Sebelum pembangunan dimulai, perlu dilakukan analisis mendalam agar embung dan jaringan irigasi ditempatkan di lokasi yang paling berdampak. •Pemetaan Potensi Air: Menentukan lokasi di mana curah hujan atau aliran air permukaan (run-off) mencukupi untuk mengisi embung. •Analisis Kesesuaian Lahan: Memastikan embung dibangun di dekat area pertanian atau pemukiman yang memang membutuhkan tambahan air baku. •Desain Teknis yang Adaptif: Menggunakan desain yang meminimalisir penguapan air (evaporasi) dan risiko pendangkalan cepat. 2. Integrasi Sistem Irigasi dan Distribusi Embung kecil berfungsi sebagai "tabungan" air, namun pendistribusiannya harus efisien. •Pembangunan Jaringan Tersier: Memastikan bahwa air dari embung benar-benar sampai ke petak sawah atau kandang ternak melalui saluran tersier yang permanen. •Penerapan Irigasi Hemat Air: Untuk daerah kering, tindak lanjutnya adalah mengintegrasikan embung dengan sistem irigasi tetes (drip irrigation) atau sprinkler agar air baku yang terbatas dapat digunakan seefektif mungkin. 3. Penguatan Kelembagaan Pengelola (Aspek Sosial) Infrastruktur yang terbangun seringkali cepat rusak jika tidak ada yang merasa memiliki. •Pembentukan/Penguatan P3A & Bumdes: Memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Badan Usaha Milik Desa untuk mengelola operasional embung secara mandiri. •Edukasi Tata Tanam: Mengatur pola tanam petani agar menyesuaikan dengan ketersediaan air di embung (misalnya: padi pada musim hujan, palawija pada musim kemarau). 4. Konservasi Daerah Tangkapan Air (Catchment Area) Embung akan cepat kering jika lingkungan sekitarnya rusak. •Reboisasi Sekitar Embung: Menanam pohon di sekitar area tangkapan air untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi yang menyebabkan pendangkalan (sedimentasi) pada embung. •Zonasi Perlindungan: Memastikan area di sekitar embung tidak beralih fungsi menjadi area industri atau pemukiman yang dapat mencemari kualitas air bersih.	Adapun Tujuan/ Masalah yang diselesaikan antara lain: 1. Meningkatkan ketahanan air daerah melalui penyediaan dan pemerataan ketersediaan air baku yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Menjamin ketersediaan air untuk sektor pertanian, khususnya dalam mendukung peningkatan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian melalui pembangunan embung kecil dan jaringan irigasi terbangun. 3. Mendukung kebutuhan air untuk peternakan, terutama pada wilayah dengan tingkat kekeringan tinggi dan keterbatasan sumber air permukaan. 4. Memenuhi kebutuhan air domestik/air bersih masyarakat, terutama pada wilayah rawan kekeringan dan daerah dengan akses terbatas terhadap sumber air. 5. Mengurangi dampak kekeringan dan ketergantungan terhadap curah hujan, dengan menyediakan infrastruktur penyimpanan dan distribusi air yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim kering. 6. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal di Provinsi NTT.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
----	--	---	--	-------------------------------	--

3.	Mendorong penguatan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia kelompok tani pemakai air irigasi	Tindak lanjut yang wajib dilakukan dimulai dengan memperkuat aspek legalitas kelompok melalui pengesahan badan hukum atau surat keputusan resmi agar organisasi memiliki dasar posisi yang kuat. Setelah itu, pengurus harus segera menyusun aturan internal (AD/ART) yang disepakati bersama, terutama mengenai sistem iuran dan jadwal pembagian air yang adil untuk mencegah konflik antartetani.	Kegiatan penguatan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia kelompok tani pemakai air irigasi dilaksanakan untuk mengatasi lemahnya legalitas, tata kelola, dan kapasitas organisasi kelompok tani yang berdampak pada ketidakjelasan pengaturan iuran, pembagian air, serta potensi konflik antartetani. Melalui pengesahan legalitas kelembagaan dan penyusunan serta penerapan aturan internal (AD/ART) yang disepakati bersama, kegiatan ini bertujuan memperkuat posisi hukum kelompok tani, meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota, serta mewujudkan pengelolaan air irigasi yang tertib, adil, dan berkelanjutan guna mendukung keberlangsungan fungsi jaringan irigasi dan peningkatan kesejahteraan petani.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
----	---	--	--	------------------------	--

4.	Meningkatkan koordinasi antar semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air.	1. Penguatan Kerangka Kelembagaan Koordinasi sering kali terhambat oleh ego sektoral. Diperlukan wadah resmi yang memiliki otoritas untuk menyelaraskan kebijakan. Optimalisasi Dewan Sumber Daya Air: Memfungsikan kembali atau memperkuat peran Dewan SDA (nasional maupun provinsi) sebagai integrator kebijakan antar-kementerian dan lembaga. Pendekatan One River, One Plan, One Management: Memastikan bahwa pengelolaan air dilakukan berbasis Wilayah Sungai (WS), bukan berdasarkan batas administrasi politik (kabupaten/kota). 2. Integrasi Data dan Informasi (Sistem Berbagi Pakai) Seringkali tiap lembaga memiliki data berbeda. Sinkronisasi data adalah kunci keputusan yang tepat. Sistem Informasi SDA Terpadu: Membangun platform digital tunggal yang dapat diakses semua pemangku kepentingan untuk memantau ketersediaan air, curah hujan, dan penggunaan air secara real-time. Transparansi Data: Membuka akses data bagi akademisi dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akuntabilitas dan inovasi. 3. Sinkronisasi Regulasi dan Perencanaan Harmonisasi Aturan: Meninjau kembali peraturan yang tumpang tindih antara undang-undang SDA, kehutanan, agraria, dan otonomi daerah. Penyusunan Rencana Induk Bersama: Memastikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) selaras dengan rencana pengelolaan sumber daya air agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan di area resapan. 4. Pelibatan Masyarakat dan Sektor Swasta Koordinasi tidak boleh hanya bersifat top-down (pemerintah ke bawah). Forum Komunitas Sungai: Melibatkan masyarakat lokal dan komunitas peduli sungai dalam pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur air. Skema Pemanfaatan Bersama (CSR/PPP): Mendorong sektor swasta untuk terlibat dalam konservasi daerah aliran sungai (DAS) melalui skema Public-Private Partnership. 5. Mekanisme Pendanaan yang Terintegrasi Anggaran Kolaboratif: Mendorong pendanaan lintas sektor untuk proyek-proyek yang bersinggungan, seperti pembangunan bendungan yang juga berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber irigasi. Insentif dan Disentif: Memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil menjaga kualitas air di hulu, dan menerapkan denda bagi pencemar di hilir.	Kegiatan peningkatan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk mengatasi lemahnya sinergi kelembagaan, belum terintegrasinya data dan informasi, serta ketidaksinkronan regulasi dan perencanaan antar sektor dan tingkat pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sumber daya air berjalan parsial, kurang efisien, dan belum optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan ketahanan air. Melalui penguatan kerangka kelembagaan, integrasi data dan informasi melalui sistem berbagi pakai, sinkronisasi regulasi dan perencanaan, pelibatan aktif masyarakat dan sektor swasta, serta penerapan mekanisme pendanaan yang terintegrasi, kegiatan ini bertujuan mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
----	--	---	---	-------------------------------	--

5.	Mengembangkan dan meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi sumber daya air berbasis informasi teknologi.	1. Integrasi Teknologi IoT dan Sensor Lapangan Langkah pertama adalah memperkuat infrastruktur fisik dengan sensor pintar yang dapat mengirimkan data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Smart Sensors: Pemasangan sensor ultrasonik untuk tinggi muka air, sensor debit elektromagnetik, dan sensor kualitas air (pH, kekeruhan, DO) di titik-titik strategis. Telemetri: Menggunakan jaringan satelit atau GSM untuk mengirimkan data dari lokasi terpencil ke pusat data (data center) secara real-time. 2. Pengolahan Data dengan Kecerdasan Buatan (AI) Meningkatkan sistem bukan hanya soal mengumpulkan data, tapi bagaimana mengolahnya menjadi kebijakan. Predictive Analytics: Menggunakan algoritma Machine Learning untuk memprediksi potensi banjir atau kekeringan berdasarkan data historis dan pola cuaca. Deteksi Anomali: AI dapat mendeteksi kebocoran pipa atau pencemaran air secara instan berdasarkan fluktuasi data yang tidak wajar. 3. Pemanfaatan Citra Satelit dan Remote Sensing Untuk cakupan wilayah yang luas (seperti satu Daerah Aliran Sungai/DAS), sensor darat perlu didukung oleh data spasial. Pemantauan Daerah Tangkapan Air: Menggunakan citra satelit untuk memantau perubahan tata guna lahan di sekitar sumber air. Analisis Vegetasi: Memantau kesehatan ekosistem yang berfungsi sebagai penyerap air alami. 4. Pengembangan Dashboard Interaktif dan Transparan Informasi harus mudah diakses oleh pengambil kebijakan maupun masyarakat. GIS Interface: Visualisasi data berbasis peta (Geographic Information System) untuk mempermudah identifikasi lokasi kritis. Early Warning System (EWS): Fitur notifikasi otomatis melalui aplikasi atau SMS jika parameter air melewati ambang batas normal.	Pengembangan dan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi sumber daya air berbasis teknologi informasi dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan data yang akurat, real time, dan terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya air, serta lemahnya dukungan informasi dalam pengambilan keputusan. Melalui integrasi teknologi IoT dan sensor lapangan, pengolahan data berbasis kecerdasan buatan (AI), pemanfaatan citra satelit dan remote sensing, serta pengembangan dashboard interaktif dan transparan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi sumber daya air, memperkuat perencanaan dan pengendalian, serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	
----	---	---	---	------------------------	--

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Frumensius A. Eddy, ST, M.Si
NIP. 19780717 201001 1 015



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Telp./Fax : - Kupang - NTT

LUAS IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI

BERDASARKAN DPPA TA. 2024

NO	NAMA PAKET	Volume rencana (Ha)	VOLUME Realisasi Ha	KET
1	2		3	7
A	Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi	334,370	56,950	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU)		33,20	
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Luwuweton (1.000 Ha) di Kabupaten Ngada	33,2	33,2	
			-	
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	334,37	23,75	
1	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokol I, II (1.007 Ha) di Kabupaten Manggarai Timur			
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kabupaten Malaka			
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kabupaten Sumba Barat	334,37	23,75	
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1 (2.750 Ha) di Kabupaten Manggarai			
	Sub Kegiatan Bidang OP SDA & Irigasi		-	
	Kegiatan Pemeliharaan Berkala :			
1	Pemeliharaan Berkala D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kabupaten Sumba Barat		-	
2	Pemeliharaan Berkala D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kabupaten Malaka		-	
3	Pemeliharaan Berkala D.I. Cancar (2.500 Ha) di Kabupaten Manggarai		-	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin :			
1	Pemeliharaan Rutin D.I. Obor (1.815 Ha) di Kabupaten Belu			Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan untuk setiap D.I. kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang berpengaruh terhadap luasan Fungsional secara keseluruhan. Dimana Kegiatan Rutin pada Bidang OP SDA & Irigasi di Tahun 2023 sebanyak 18 D.I. tersebar dengan total Luas Pengaruh terhadap Luas Fungsional sebesar 8.980 Ha.
2	Pemeliharaan Rutin D.I. Maubusa (1.350 Ha) di Kabupaten Belu			
3	Pemeliharaan Rutin D.I. Hasfuik (1.600 Ha) di Kabupaten TTU			
4	Pemeliharaan Rutin D.I. Aeroki (1.242 Ha) di Kabupaten TTU			
5	Pemeliharaan Rutin D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kabupaten Malaka			
6	Pemeliharaan Rutin D.I. Batu Putih/Oebobo (400 Ha) di Kabupaten TTS			
7	Pemeliharaan Rutin D.I. Enorai (1.100 Ha) di Kabupaten Kupang			
8	Pemeliharaan Rutin D.I. Waiwadan (1.450 Ha) di Kabupaten Kupang			
9	Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Rana (1.022 Ha) di Kabupaten Manggarai Timur			
10	Pemeliharaan Rutin D.I. Cancar (1.450 Ha) di Kabupaten Manggarai Timur			
11	Pemeliharaan Rutin D.I. Nua Kua (1.200 Ha) di Kabupaten Ngada			
12	Pemeliharaan Rutin D.I. Malatawa (1.344 Ha) di Kabupaten Ngada			
13	Pemeliharaan Rutin D.I. Malawitu (1.000 Ha) di Kabupaten Nagekeo			
14	Pemeliharaan Rutin D.I. Wae Ganggang (1.281 Ha) di Kabupaten Manggarai Barat			
15	Pemeliharaan Rutin D.I. Melolo (1.215 Ha) di Kabupaten Sumba Timur			
16	Pemeliharaan Rutin D.I. Mataiyang (1.579 Ha) di Kabupaten Sumba Timur			
17	Pemeliharaan Rutin D.I. Loli (2.390 Ha) di Kabupaten Sumba Barat			
18	Pemeliharaan Rutin D.I. Mataliku (1.089 Ha) di Kabupaten Sumba Barat Daya			
	Luas pengaruh penanganan kegiatan TA.2025		56,95	
	Luas total Irigasi yang ditangani sampai dengan TA.2025		35.704,79	
	Jumlah Total Luasan Penanganan s/d T.A. 2025		35.761,74	

Kupang, Desember 2025

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepala Bidang SDA

NIP.....



Kupang, 3 Februari 2026

DATA PELANGGAN UPTD SPAM

No	Keterangan	Jumah Sambungan Rumah (SR) dari Kapastias Produksi (150 lt/dtk)	Kapasitas Yang Termanfaatkan Tahun 2025 75 ltr/dtk
1.	Pelanggan UPTD SPAM terdiri dari Undana Kupang, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, PT. Angkasa Pura I Kupang, RS. Siloam, Lippo Palza, Kelompok Masyarakat Wilayah Penfui Timur dan Baumata Utara, RSU W. Z. Johannes Kupang dan Hotel-hotel daerah Jln. Timor Raya.	15.000 SR	7.500 SR

**DATA PENJUALAN AIR MINUM CURAH
TAHUN 2025**

No	Bulan	Suplai Air (M ³)
1.	Januari	31.716
2.	Februari	39.424
3.	Maret	44.716
4.	April	29.554
5.	Mei	39.862
6.	Juni	36.781
7.	Juli	36.783
8.	Agustus	39.393
9.	September	37.121
10.	Oktober	39.161
11.	November	34.110
12.	Desember	35.290
Total		443.911
Rata-rata per Bulan		36.993
Rata-rata Pemakaian per SR (M ³)		16
Jumlah SR Terlayani		2.312

Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur



Erasmus Jogo, SE., MM

PENJELASAN

Kapasitas produksi terpasang adalah 150 L/dtk, sedangkan kapasitas produksi termanfaatkan saat ini adalah 75 L/dtk untuk 1 pompa yang memproduksi atau setara dengan ± 7.500 SR yang dapat disuplai kepada masyarakat atau pelanggan.

Asumsi: Rata-rata pemakaian 1 Ltr/Dtk = 100 SR, maka 75 ltr/dtk = 7.500 SR/ 24 jam kerja.

Pada tahun 2025 waktu kerja UPTD SPAM yang dioperasikan 10 jam kerja/hari.

Dari waktu kerja yang dioperasikan seharusnya mampu melayani sebanyak 3.129 SR akan tetapi realisasi pada tahun 2025 sebanyak 2.312 SR. Sehingga capaian pada tahun 2025 sebesar 73,90 % dari waktu kerja operasional pada tahun 2025.

Pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaetn Kupang, meliputi: Desa Baumata Utara dan Desa Penfui Timur, sedangkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Kupang meliputi: Kec. Kelapa Lima: Kelapa Lima, Oesapa, Oesapa Barat, Oesapa Selatan; Kec. Kota Lama: Oeba, Nefonaek, Pasir Panjang; Kec. Oebobo: Fatului, Oebufu, TDM; Kec. Maulafa: Naimata dan Penfui.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang (PDAM Kota Kupang), Pemerinta Kabupaten Kupang (PDAM Kabupaten Kupang) dengan Pemerintah Provinsi (UPTD SPAM).
2. Belum adanya Reservoir Induk sebagai penyeimbang sehingga pelayanan yang dilakukan sampai dengan saat ini adalah dengan sistem tembak langsung.

Usulan konkrit:

1. Perlu adanya peran Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan air minum di Kabupaten Kupang dan khususnya Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi agar pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi terkait kondisi ini.
2. Perlu adanya Reservoir Induk sebagai penyeimbang agar pelayanan air minum curah dapat dilakukan secara gravitasi selama 1 x 24 jam/hari.

Kepala BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur



Erasmus Jogo, SE., MM

Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Dokumentasi		
1	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala – Wetana (Bts. Kab Sumba Barat Daya)	 9°42'13.82731"S 119°9'52.0... Penanganan Long Segmen Sp. Patiala	 9°42'13.883"S 119°9'52.0... an Long Segmen Ruas Jalan SP.Patiala-Wetana (BTS. Kab. S... Barat	
2	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar di Kab. Alor	 CV. Narwastu PERTAMA Architecture, Planning & Eng... Jumat, 29 8°13'1.176"S 124°24'9... Kecamatan A... K... Nusa Te... PEMATOKA... Penanganan... Ruas Jalan b...	 CV. Narwastu PE... Architecture, Planning... Kamis, 3... 8°13'0.948"S 124°24'1... Kecamatan... Nusa... Penanganan... Ruas Jalan	 16 De... 8°13'0.792"S 124°24'... Kecamatan... Nusa... Penanganan... Ruas Jalan
3	Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati di Kota Kupang		 Minggu, 12 Okt... 10.166220973 123.99... Jalan F... Altitude 3... Sp. Polda - Sp. Patung Merpati Index num...	
4	Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu) Di Kabupaten Malaka	 Kecamatan Mala... Kabupaten... Nusa Tenggara... Altitude 9... Speed...	 CV. SABA CO... Jl. BAYU MELU DI BELU SEPANG... 9°29'19.707116"S 124°57'19... Kabupaten... Kecamatan... Nusa Tenggara... Altitude... Dek. Japda Pondaudi Agg... Penanganan Long Segmen Ruas Jalan SP. Welaus - Kusa (BTS. Kabupaten... Belu)	 CV. SABA CO... Jl. BAYU MELU DI BELU SEPANG... 9°29'19.843"S 124°57'19... Kabupaten... Kecamatan... Nusa Tenggara... Altitude... Dek. Japda Pondaudi Agg... #Penanganan Long Segmen Ruas Jalan SP. Welaus

Dokumentasi Kegiatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Dokumentasi		
5	Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa			
6	Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang Kab. Flores Timur			

Dokumentasi Kegiatan Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Dokumentasi		
1	Pemasangan Water Meter Pada Sumber Air Permukaan di Kabupaten Timor Tengah Utara			
2	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Ende			
3	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur			
4	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Rote Ndao			

Dokumentasi Kegiatan Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Dokumentasi		
1	Pembangunan Jaringan Perpipaan Keciaptakaryaan (Cipta Karya)			

Dokumentasi Kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	  

**Dokumentasi Kegiatan Sekretariat
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025**

No	Kegiatan	Dokumentasi		
1	Rehabilitasi Gedung kantor Gubernur Pertama • Rehab/Pemeliharaan Gedung A • Rehab/Pemeliharaan Gedung D • Rehab/Pemeliharaan Gedung E			
2	Rehabilitas dan Penataan Gedung A Kantor Gubernur Pertama • Penataan Ruang Pimpinan Dinas • Rehab/Penataan Ruang Rapat Dinas • Penataan Lobi Dinas			

Dokumentasi Kegiatan UPTD SPAM
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2025

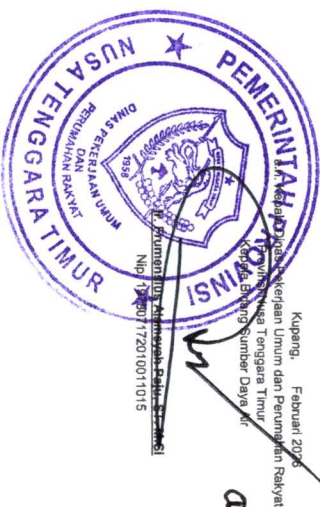
No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Pengembangan Jaringan Distribusi Utama SPAM dalam Kota Kupang: • Kompleks Kantor Gubernur • Hotel Sylvia Kupang • Rumah Sakit Wirasakti Kupang	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
Jalan Basuki Radjinal Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Provinsi Kupang - NTT

DAFTAR LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG
TAHUN 2019 S/D 2025

No. Urut	Nama Embung	Lokasi			Jenis Bangunan	Tahun Mulai	PELAKSANA	Anggaran (Rp. 1.000)		Keterangan										DAI (m)	Tinggi (m)																							
		Kab./Kota	Kecamatan	Kel./Desa				ABSD 1	Total	Panghulu	Luas Area (Ha)	Tempo (jam)	Besarnya (m³)	Spillway (m)	Saluran Over Flow (m)	Pipa Distribusi (m)	Saluran Kanan (m)	Saluran Kiri (m)	Pagar BROWD (m)			TMS (m)	Kapasitas (m³)	DAI (m)																				
1	PEMBANGUNAN EMBUNG TAHUN ANGGARAN 2019	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	EMBUG ALAKET	SUMBA TIMUR	KATULA HAWU LINDU	PRIBAKUL	0	2019	CV. GMADE	1.164.979.000,00	1.164.979.000,00	160,00	4.167,25	7,0	1,57	68,00	8,00	20,00	2,00	300	1,00	1,00	-	6,00	6,0	18.488,82	0,125																			
JULAI AH																									1.164.979.000	1.164.979.000																		
II																									PEMBANGUNAN EMBUNG TAHUN ANGGARAN 2020																			
2	EMBUG MAMAKA	SABU PAJALA	HAWU BEMARA	LOBACHE	IDEA	2020	CV. SOMBA HASBO	1.935.537,100	1.935.537,100,00	52,00	4.175	8,00	1,57	68,00	8,00	20,00	2,00	120,00	2,00	2,00	-	6,00	7,0	26.228,84	-	0,26																		
3	EMBUG SDO	ROTE NDO	LANOLEKO	DAJANA	IDEA	2020	CV. TRISA	1.008.370.000,00	1.008.370.000,00	186,00	4.175	8,00	1,57	68,00	8,00	20,00	2,00	1039,00	2,00	3,00	1,00	-	6,00	7,0	24.099,86	-	0,18																	
JULAI AH																									1.164.979.000	1.164.979.000																		
III																									PEMBANGUNAN EMBUNG TAHUN ANGGARAN 2021																			
1	EMBUG SUN	KUPANG	SEMAU	USKA	Taman Tumbuh	2021	CV. NAKDA KARYA PUTRA BHAYAN	1.848.186.000,00	1.848.186.000,00	124,20	4.173,84	10,00	1,57	35,53	4,00	28,70	4,00	280,00	1,00	1,00	-	6,00	8,0	36.882,44	-	0,0405																		
2	EMBUG CEMAK	KUPANG	KUPANG BARAT	CEWIK	IDEA	2021	CV. NAKDA KARYA PUTRA BHAYAN	1.186.986.000,00	1.186.986.000,00	64,47	4.163,86	10,00	0,68	46,97	5,00	32,00	5,00	786,00	4,00	4,00	4,00	-	6,00	11,00	9,00	20.891,45	-	0,4058																
3	EMBUG NAKUN	KOTA KUPANG	ALAK	MAJINI	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	1.371.770.000,00	1.371.770.000,00	70,48	4.172,37	8,00	0,68	113,69	3,00	100,88	3,00	272,00	2,00	2,00	1,00	-	6,00	15,00	40,00	12,00	1.139																	
4	EMBUG PENKABE	KOTA KUPANG	ALAK	PENKABE	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	1.371.770.000,00	1.371.770.000,00	70,48	4.173,53	10,00	1,53	46,97	5,00	28,50	5,00	286,00	0,00	2,00	1,00	-	6,00	15,00	40,00	12,00	1.139																	
5	EMBUG FALUDUN	TTU	BIBON ANLEU	KOTA FOLUN	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	1.324.977.000,00	1.324.977.000,00	118,71	4.148	8,00	3,30	35,70	3,00	31,25	3,00	4.018,46	4,00	1,00	1,00	-	6,00	489,96	6,00	7,0	23.830,00	-	0,125															
6	EMBUG CEFLO	TTU	PONU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	1.324.977.000,00	1.324.977.000,00	118,71	4.148	8,00	3,30	35,70	3,00	31,25	3,00	47,25	3,00	4.018,46	4,00	1,00	1,00	-	6,00	489,96	6,00	7,0	23.830,00	-	0,125														
7	EMBUG BELTA	MAJAKA	KOBALMA	LUKELU UTARA	IDEA	2021	PT. NAKDA KARYA PUTRA BHAYAN	4.482.808.000,00	4.482.808.000,00	192,85	4.148	10,00	0,41	41,94	3,00	24,78	5,00	1.283,00	3,00	2,00	2,00	-	6,00	793,72	6,00	7,0	38.000,00	-	0,15															
8	EMBUG JUMPAH	MAJAKA	KUFEU	IDEA	2021	PT. NAKDA KARYA PUTRA BHAYAN	4.482.808.000,00	4.482.808.000,00	192,85	4.148	10,00	0,41	41,94	3,00	24,78	5,00	1.283,00	3,00	2,00	2,00	-	6,00	793,72	6,00	7,0	38.000,00	-	0,15																
9	EMBUG FOKOKANAS	MAJAKA	MAJAKA TENGAH	BARADA	IDEA	2021	PT. NAKDA KARYA PUTRA BHAYAN	4.482.808.000,00	4.482.808.000,00	192,85	4.148	10,00	0,41	41,94	3,00	24,78	5,00	1.283,00	3,00	2,00	2,00	-	6,00	793,72	6,00	7,0	38.000,00	-	0,15															
10	EMBUG BESPAET I	TTU	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	4.548.700.000,00	4.548.700.000,00	80,00	4.153,80	8,00	0,61	19,60	5,00	20,41	7,00	1.800,00	2,00	1,00	1,00	-	6,00	31.298,00	-	0,3	400																	
11	EMBUG BESPAET I	TTU	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	4.548.700.000,00	4.548.700.000,00	80,00	4.153,80	8,00	0,61	19,60	5,00	20,41	7,00	1.800,00	2,00	1,00	1,00	-	6,00	31.298,00	-	0,3	400																	
12	EMBUG BESPAET I	TTU	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	4.548.700.000,00	4.548.700.000,00	80,00	4.153,80	8,00	0,61	19,60	5,00	20,41	7,00	1.800,00	2,00	1,00	1,00	-	6,00	31.298,00	-	0,3	400																	
13	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
14	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
15	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
16	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
17	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
18	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
19	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
20	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
21	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
22	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
23	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
24	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
25	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
26	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
27	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
28	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
29	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
30	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
31	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
32	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
33	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
34	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
35	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
36	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,53	4.159,30	9,00	0,69	30,70	4,00	16,59	4,00	429,00	-	4,00	-	6,00	8,00	26.144,00	-	0,026	-	0,026																
37	EMBUG PASISA	ENDE	MAJAKA TENGAH	LANANUTU	IDEA	2021	PT. WILAYAT KARYA SEMESTA	2.517.028.000,00	2.517.028.000,00	48,																																		





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Ririgasi
 Jalan Basuki Rachman Nomor 1, Gedung A Kantor Gubernur, Petaema Kupang - NTT

DATA DAERAH RIRIGASI KEWENANGAN PROVINSI NTT

FID	NAMA D.J	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas PERMEN PUPPI(4/2017 s (Ha)	Luas BIG (Ha)	Luas Baku (Ha)	Luas Potensial (Ha)	Luas Fungsional (Ha)	Sumber Air	IKSI (%)						Areal Terdampak Kondisi Jaringiran Irigasi (Ha)					
											1. Pasaran Fisik (45%)	2. Produktivitas (15%)	3. Sarana Penunjang (10%)	4. Organisasi Personalia (15%)	5. Dokumentasi P3A (5%)	6. P3A/GP3A/ P3A (10%)	Jumlah	- Baik (Ha)	- Rusak Rengas (Ha)	- Rusak Sedang (Ha)	- Rusak Berat (Ha)	Total
23	D.I MELOLO	Sumba Timur	Unelu	Wachadung, Marungding, Matwai Alu, Patuwung, Wulubusa	1215	1215	1215	596	592	Sungai	30	12	2	11,67	2	0,75	59,42	224,88	147,62	56,5	169	698
24	D.I NETERMANU	Kupang	Amilang Timur	Netermanu Selatan, Netermanu Utara, Netermanu	1350	1360	1350	664	664	Sungai	22,25	5	2	7,5	5	2,5	44,25	281,2	93,8	128,28	180,72	694
25	D.I NIJUKIA	Nagisa	Wolomaze	Wau, Dawatua Timur, Dawatua	1200	1200	1200	183	59	Sungai	15	3	6,6	5	5	1	32,6	17	5	8	29	59
26	D.I LOBOR	Belu	Tasirac Barat, Raimanak	Rimbac har, Lurundu, Mandau, Rafak, Natinu	1815	1815	1815	701	701	Sungai	30	4	10	3	2	0,35	48,35	228,25	103,75	112,25	287,75	710
27	D.I OEBELO	TIS	Amanuan Selatan	Oebelo	1089	1069	1069	370	368	Sungai	17	3	2,5	7	5	4,5	39	50,94	18,48	68,01	229,57	368
28	D.I PONU	TTU	Block Ayih	Kel. Penu	1430	1430	1430	843	308	Sungai	20	3	6,6	7	5	4,5	46,1	105	50,91	7,29	144,8	308
29	D.I SAWAR LENDA	Manggarai	Salar Mesa Barat	Salar Ruwik, Salar Lenda, Salar Lulu, Caka	1525	1525	1525	1193	399	Sungai	31,25	4	6,6	7,5	2	2,5	53,85	183,4	26,16	73,08	116,36	399
30	D.I WAE CES 1-4	Manggarai	Lampir Reribung, Wae R1, Cibai	Godo Dyal, Pau, Lawi, Puak, Moamuku, Puak, Wai, Kori, Tenda, Bangkai Kenda, Kori, Gido Wai, Gido Wae, Gido Wai, Rangi, Salar Ngeking, Bangka Jong, Mchab, Poo, Comping Ninas, Cero, Wae R1, Lungu, Gido Mendo, Gido Cador	2750	1990	1990	1990	626	Sungai	18,8	8,4	1	12	1	0,3	41,5	224,34	84,84	34	285,82	629
31	D.I WAE GANGGANG	Manggarai Barat	Mecang Pagar	Nunga Kintor Barat, Romang, Bering Nopie	1281	1281	1281	436	438	Sungai / Mata Air	22,5	5	12,6	3	3	2,5	48,6	117,1336	75,26	85,8076	159,7048	436
32	D.I WAE MOKEL 1, II	Manggarai Timur	Kolak Orcha	Mokel, Berling Puak, Mokel Ruwi, Mokel Beroq	1007	1007	1007	715	302	Sungai / Mata Air	18	5	6,6	7	4	2,5	43,1	137	57	8	98	300
33	D.I WAE PAKU	Manggarai Barat	Seronggung	World, Gido Manti, Rana Maling	1050	1050	1050	300	95	Sungai	37,25	5	6,6	5	1	2,5	57,35	372	171,19	50,49	57,32	651
34	D.I WAE TUDU LAYO	Manggarai Barat	Lunior Salar	Nangan Bae	1200	0	0	0	0	Sungai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D.I WAEKELCH SAWAH	Sumba Barat Daya	Wewene Timur	Mau Eweli, Mandak Kalida, Kalambu Ndara	2500	2500	2500	863	739	Mata Air	23,5	5	6,6	5	5	2,5	47,6	1002	108	167	191	1458
36	D.I WAEKACANG	Manggarai Barat	Seronggung	Seronggung, Gido Mau, Wau, Panggil, Gado Nading, Wae Los	1200	1200	1200	277	118	Sungai	31,75	5	12,6	7	3	2,5	61,85	44,2	13	9,2	35,6	102
37	D.I WAEKAWA	Manggarai Timur	Kolak Orcha, Elar	Gurung Baru, Rana Mbata, Pui, Sipi, Gado Wau, Pasi Waru	1200	1022	1022	330	120	Sungai	17,5	4	6,6	7	4	2,5	41,6	105	60	46	119	330
38	D.I WAI MATAN BOTO	Lembata	Nagawutung Omisari	Panikerak, Idalidung, Pusawa, Weweng, Bani	1350	1330	1350	131	131	Sungai	31	3,5	6,6	0	1	0	42,1	25	15	35	56	131
39	D.I WAIKELAK	Flora Timur	Tiema, Demon	Serunhu, Lemoduwik	1080	6	6	6	6	Sungai	10,25	2,5	6,6	0	1	0	20,35	3	1	0	2	6
40	D.I WAIWUJAN	Flora Timur	Ading Barat	Mukuh	1450	89	89	89	89	Sungai	10,5	3	2,5	5	2	0	23	18,25	3,75	0,75	75,25	89
41	D.I WANOKKA	Sumba Barat Daya	Wendaka	Makuriku, Tara Manu, Huru, Mado, Waiunuk (Waiunuk, Baliku, Pasi rana, Tara Manu, Kethuluku, Awevici, Rewera, Prindik)	2653	1034	1034	831	831	Sungai	18,33	11,84	3,56	8,01	2,36	5,16	50,28	882,07	12,5	0	39,43	1034
42	D.I WEUMAN	Malaka	Welman, Malaka Barat	Haitinik, Lalien, Kiseiden, Nias, Laido, Makliran, Looloun, Raimatau, Rabasa Heeren, Rabasa	1000	1084	1084	1089	838	Mata Air	26	5,25	2	7,5	2	0,75	43,6	172,5	27	80	201	481
					69506,00	47795,00	47795,00	23122,00	16504,00								7898,0236	2380,59	2953,4816	7102,2045	20334,3	





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Telp./Fax : - Kupang - NTT

LUAS IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI
BERDASARKAN DPPA TA. 2024

NO	NAMA PAKET	TARGET VOLUME Ha	REALISASI VOLUME Ha	BOBOT %	KET
1	2	3	4		5
A	Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi	1.148,360	913,400	79,54	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU)	33,43	33,43		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwur weton (1.000 Ha) di Kabupaten Ngada	33,43	33,43	100,00	
2			-		
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	1.094,93	853,26	77,93	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman (1.000 Ha) di Kabupaten Malaka	454,01	167,89	36,98	Tidak Sesuai target rencana karena terjadi pemindahan ruas pada saat pelaksanaan.
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kabupaten Sumba Barat	334,37	378,82	113,29	
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 (2.750 Ha) di Kabupaten Manggarai	30,00	30,00	100,00	
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Mokel I, II (1.007 Ha) di Kabupaten Manggarai Tim	276,55	276,55	100,00	
	Sub Kegiatan Bidang OP SDA & Irigasi	20,00	26,71	133,55	
	Kegiatan Pemeliharaan Berkala :				
1	Pemeliharaan Berkala D.I. Batu Putih/Oebobo (400 Ha) di Kabupaten TTS	6,67	8,11	121,65	
2	Pemeliharaan Berkala D.I. Kolesia (1.250 Ha) di Kabupaten Sikka	6,67	2,60	39,00	
3	Pemeliharaan Berkala D.I. Mataiyang (1.579 Ha) di Kabupaten Sumba timur	6,67	16,00	240,00	
4	Pemeliharaan Berkala D.I. Enorain (1.100 Ha) di Kabupaten Kupang	6,67	5,72	85,80	
	Luas pengaruh penanganan kegiatan TA.2024		913,40		
	Luas total Irigasi yang ditangani sampai dengan TA.2023		35.147,47		
	Jumlah Total Luasan Penanganan s/d T.A. 2024		36.060,87		

Kupang, Desember 2024

a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Bidang PSDA & Irigasi



Buce Fangidae, ST., M.Si.
NIP.197505122000121005



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Telp./Fax : - Kupang - NTT

LUAS IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI
BERDASARKAN DPPA TA. 2025

NO	NAMA PAKET	TARGET VOLUME Ha	REALISASI VOLUME Ha	BOBOT %	KET
1	2	3	4		5
A	Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi	36,250	36,250	100,00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU)	12,50	12,50		
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwur weton (1.000 Ha) di Kabupaten Ngada	12,5	12,50		Terjadi penambahan Luas Pengaruh dari rencana 33,34 Ha, akibat pemindahan Sub D.I. Dari rencana awal dan Addendum perubahan/Luncuran.
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	23,75	23,75	100,00	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kabupaten Sumba Barat	23,75	23,75	100,00	
	Luas pengaruh penanganan kegiatan TA.2025		36,25		
	Luas total Irigasi yang ditangani sampai dengan TA.2024		36.060,87		
	Jumlah Total Luasan Penanganan s/d T.A. 2025		36.097,12		

Kupang, Desember 2025
a.n. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Bidang Sumber Daya Air

cur

Prumenshas A. Batu, ST, M.Si
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NUSA TENGGARA TIMUR
P. 197804172010011015



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung A Kantor Gubernur Pertama Kupang - NTT

DATA PRIMER DAN SEKUNDER JARINGAN IRIGASI KEMENANGAN PROVINSI NTT

No.	NAMA DAERAH IRIGASI (Dx)	KABUPATEN / KOTA	Berdasarkan an Permen 14/2015	Baku (Pemetaan n 1Gt)	Potensial (Pemetaan n 1Gt)	Sawah/Run gisional (Pemetaan 1Gt)	SALURAN PRIMER (m)						SALURAN SEKUNDER (m)					
							AL	RN	BA	RR	RS	RB	AL	RN	BA	RR	RS	RB
							AL	RN	BA	RR	RS	RB	AL	RN	BA	RR	RS	RB
1	Batu Putih/Oe	Kab. Timor Tengah Se	400	400,00	227,00	227,00	2.377,21	-	812,50	187,50	385,50	991,71	4.565,93	1.439,22	2.809,50	217,30	356,00	2.622,35
2	Bilumna	Lintas Kab. TTS & Kai	1.430	78,00	78,00	78,00	200,00	1.200,00	-	-	-	1.400,00	500,00	9.800,00	125,00	-	10.175,00	-
3	Harulik	Lintas Kab. TTU & Kai	1.600	666,00	666,00	666,00	1.158,50	576,00	940,82	57,93	-	735,75	2.672,30	4.091,50	2.601,90	33,66	-	4.128,24
4	Arak	Kab. Timor Tengah Ut	1.242	777,00	777,00	768,00	4.278,06	-	3.131,57	-	-	1.146,49	5.823,60	3.210,00	2.080,08	542,14	55,16	6.356,21
5	Fatu Besi	Kab. Belu	1.660	178,00	178,00	178,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Madusa	Kab. Belu	1.360	483,00	483,00	483,00	2.925,58	1.134,46	1.260,00	-	-	2.820,04	5.825,60	2.500,00	5.045,32	772,12	492,26	2.015,90
7	Obor	Kab. Belu	1.815	1.815,00	701,00	701,00	1.758,82	-	212,00	26,50	26,50	1.493,82	3.142,94	5.500,00	3.044,25	-	1.014,75	4.583,94
8	Konga	Kab. Flores Timur	1.100	175,00	175,00	175,00	712,00	-	534,00	56,96	49,84	71,20	9.307,89	3.820,06	7.097,42	827,60	-	5.202,94
9	Wakelaik	Kab. Flores Timur	1.080	6,00	6,00	6,00	1.575,00	1.250,00	705,00	157,50	78,75	1.883,75	5.259,20	716,35	2.846,70	-	712,50	2.416,35
10	Waiwaden	Kab. Flores Timur	1.450	99,00	99,00	99,00	1.247,80	2.150,00	75,00	75,00	-	2.572,80	8.023,00	3.520,00	3.826,00	526,00	1.010,00	6.181,00
11	Enoran	Kab. Kupang	1.100	73,00	73,00	73,00	250,00	-	200,00	12,50	12,50	25,00	4.043,86	8.066,14	1.963,50	-	535,50	9.631,00
12	Kalidok	Kab. Kupang	1.071	1.071,00	804,00	100,00	2.390,00	73,50	1.434,00	478,00	-	551,50	4.167,74	5.927,86	2.083,87	416,77	1.425,52	7.594,96
13	Netemenu	Kab. Kupang	1.350	1.350,00	684,00	684,00	-	-	2.680,50	177,70	177,70	518,10	17.171,17	2.596,83	14.324,57	1.625,62	2.938,30	2.938,30
14	Wai Maran Bodi	Kab. Lembata	1.350	1.350,00	131,00	131,00	1.619,00	967,05	63,45	63,45	126,90	2.861,60	3.789,60	7.298,40	2.232,30	2.232,30	177,00	8.501,70
15	Alas	Kab. Malaka	1.650	1.650,00	94,00	94,00	113,00	450,00	113,00	-	-	450,00	2.975,78	4.961,22	2.321,11	357,09	146,79	5.110,01
16	Weliman	Kab. Malaka	1.000	1.084,00	1.089,00	836,00	9.628,83	-	9.202,02	126,50	111,40	188,81	4.900,00	2.726,60	2.941,39	500,00	125,00	(349,79)
17	Cancar	Kab. Manggarai	2.500	2.500,00	709,00	709,00	4.431,70	70,80	525,48	-	-	2.595,27	11.074,39	3.346,60	8.260,64	815,09	-	13.905,41
18	Golowoi	Kab. Manggarai	1.500	1.500,00	301,00	230,00	1.395,02	1.941,40	3,35	-	260,81	2.510,33	2.150,00	12.250,00	218,19	276,41	-	5.345,26
19	Sater Lenda	Kab. Manggarai	1.525	1.525,00	1.193,00	399,00	2.753,25	2.250,00	2.759,45	29,44	131,81	2.092,55	9.557,79	6.302,00	5.392,78	302,29	311,79	9.852,93
20	Wae Cas 1-4	Kab. Manggarai	2.750	1.990,00	1.990,00	626,00	10.845,00	313,16	8.406,40	198,02	-	2.551,74	27.487,00	4.681,30	10.834,52	592,71	-	20.691,07
21	Wae Ganggang	Kab. Manggarai Barat	1.281	1.281,00	438,00	438,00	4.923,83	6.306,55	3.753,88	56,13	30,72	7.389,69	1.668,81	1.677,37	6.194,48	141,00	258,00	(3.247,30)
22	Wae Paku	Kab. Manggarai Barat	1.050	1.050,00	300,00	95,00	2.320,17	23.986,27	1.285,17	150,00	200,00	24.671,27	186,62	17.702,48	1.020,00	200,00	250,00	16.419,10
23	Wae Tiwo Lawd	Kab. Manggarai Barat	1.200	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	6.216,81	3.980,99	1.335,50	417,76	-	-	4.899,13
24	Waeacang	Kab. Manggarai Barat	1.007	1.007,00	277,00	118,00	4.713,69	4.385,40	2.882,28	198,02	-	1.127,68	13.959,78	5.905,57	9.196,76	702,60	1.228,40	13.957,99
25	Wae Mokol I, II	Kab. Manggarai Timur	1.002	1.022,00	330,00	120,00	4.946,00	258,43	3.878,73	140,40	175,50	823,71	5.650,00	3.400,00	4.237,50	395,50	282,50	4.134,50
26	Waeana	Kab. Manggarai Timur	1.022	1.022,00	330,00	120,00	1.170,00	750,00	780,39	140,40	175,50	823,71	5.650,00	3.400,00	4.237,50	395,50	282,50	4.134,50
27	Malawitu	Kab. Nageko	1.000	1.000,00	1.224,00	718,00	1.201,42	750,00	1.052,02	63,00	42,00	794,40	5.172,42	6.077,58	2.731,51	258,62	620,69	7.639,18
28	Ganggang	Kab. Nageko	1.000	1.000,00	462,00	398,00	6.76,50	314,50	231,00	-	-	760,00	8.865,34	4.384,66	3.714,21	478,03	5.340,72	4.783,03
29	Luwuweton	Kab. Nageko	1.000	1.000,00	376,00	295,00	4.196,07	2.583,24	2.715,50	50,00	99,00	3.914,81	4.811,78	3.236,49	6.304,68	75,00	203,15	1.465,44
30	Malabawa	Kab. Nageko	1.344	1.344,00	766,00	556,00	828,50	-	699,28	-	62,85	66,38	8.876,70	5.545,02	8.656,49	339,54	257,72	5.167,96
31	Nukua	Kab. Nageko	1.200	1.200,00	183,00	59,00	210,00	2.500,00	-	-	-	2.710,00	3.000,00	2.400,00	-	-	-	2.700,00
32	Manubulu	Kab. Rote Ndao	1.250	1.250,00	560,00	560,00	1.250,00	1.250,00	625,00	187,50	125,00	1.562,50	4.849,27	4.975,47	2.788,89	1.471,45	863,47	4.700,92
33	Koleisa	Kab. Sikka	1.250	2.390,00	230,00	230,00	1.372,00	-	894,00	343,00	34,30	100,70	6.645,50	-	3.768,68	398,73	1.547,72	1.547,72
34	Loli	Kab. Sumba Barat	2.390	2.390,00	781,00	781,00	2.302,60	1.250,00	1.190,45	91,18	25,58	1.031,99	16.771,78	6.066,82	14.334,25	1.502,13	1.612,16	5.390,06
35	Warokaka	Kab. Sumba Barat	2.653	1.034,00	831,00	831,00	20.102,00	-	11.908,61	1.808,39	3.800,90	2.584,10	7.361,54	6.220,61	2.101,19	2.366,18	3.756,27	5.356,51
36	Mataliku	Kab. Sumba Barat Da	1.089	1.089,00	438,00	438,00	487,10	-	467,67	-	-	717,30	5.050,00	6.850,00	5.900,64	252,50	5.459,36	5.459,36
37	Waeleikh Sawu	Kab. Sumba Barat Da	2.500	2.500,00	863,00	739,00	1.382,34	-	645,04	-	-	737,30	13.465,00	6.142,00	7.348,28	1.193,89	497,46	9.603,60
38	Mangili	Kab. Sumba Timur	2.666	2.666,00	983,00	698,00	1.275,00	-	1.275,00	-	-	-	18.465,00	6.142,00	7.348,28	1.193,89	497,46	9.603,60
39	Mataiyang	Kab. Sumba Timur	1.579	1.572,00	1.216,00	754,00	4.087,00	-	1.035,95	267,50	355,00	2.029,30	10.435,00	12.000,00	8.421,93	1.252,20	240,51	12.760,87
40	Meleio	Kab. Sumba Timur	1.215	1.215,00	568,00	562,00	11.032,36	-	7.829,40	61,45	122,90	301,25	9.133,70	5.140,00	6.478,04	913,37	2.866,36	2.866,36
41	Oebebo	Kab. Timor Tengah Se	1.089	1.089,00	370,00	368,00	1.229,00	125,00	888,40	187,50	125,00	315,45	5.735,50	5.750,00	3.701,53	860,33	286,78	6.636,88
42	Poru	Kab. Timor Tengah Ut	1.430	1.430,00	843,00	308,00	1.250,00	275,00	897,05	187,50	125,00	315,45	5.735,50	5.750,00	3.701,53	860,33	286,78	6.636,88
TOTAL			60.328	48.549	23.232	16.614	123.176,25	58.563,69	82.066,54	6.272,80	6.740,85	86.657,74	290.084,17	201.684,68	138.123,49	21.503,25	20.083,65	252.058,47



DAFTAR PAKET SUMUR BOR TAHUN 2022 - 2025
BIDANG SUMBER DAYA AIR - DINAS PUPR PROVINSI NTT

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPK	NAMA KEPALA BIDANG	NAMA PENERIMA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
A. TAHUN ANGGARAN 2025							
1	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	Kelurahan Oetele Kec. Oeobo Kota Kupang	200,000,000	Feriyanus Pong, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Oetele	
2	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	Desa Baumata Uliara Kec. Taebenu Kabupaten Kupang	200,000,000	Feriyanus Pong, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Baumata Uliara	
3	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	Desa Biuduktoho Kec. Rinhat Kabupaten Malaka	200,000,000	Feriyanus Pong, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Biuduktoho	
4	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	Desa Leosama Kec. Kakulik Mesak Kabupaten Belu	200,000,000	Feriyanus Pong, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Leosama	
5	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	Desa Wec Dabo Kec. Loli Kabupaten Sumba Barat	200,000,000	Feriyanus Pong, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Wec Dabo	
6	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	Desa Payola Uimbu Kec. Loura Kabupaten Sumba Barat Daya	200,000,000	Feriyanus Pong, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Payola Uimbu	
7	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	Desa Kadipada Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya	200,000,000	Feriyanus Pong, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Kadipada	
8	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Ende	Desa Kobalaba Kec. Maukaru Kabupaten Ende	200,000,000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si		
9	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Ende	Desa Toti Timur Kec. Kota Baru Kabupaten Ende	200,000,000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si		
10	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	Desa Nusadani Kec. Solor Barat Kabupaten Flores Timur	200,000,000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si		
11	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	Desa Nampar Tabang Kec. Lambalela Uliara Kabupaten Manggarai Timur	200,000,000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si		
12	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	Desa Limakoli Kec. Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao	200,000,000	Yosualdus S. Mansyhu, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Limakoli	
13	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Alor	Desa Fanating Kec. Teluk Mutiara Kabupaten Alor	200,000,000	Yosualdus S. Mansyhu, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Fanating	
14	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Alor	Desa Welai Barat Kec. Teluk Mutiara Kabupaten Alor	200,000,000	Yosualdus S. Mansyhu, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Welai Barat	
15	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	Kelurahan Fatulka Kecamatan Maulafa Kota Kupang	200,000,000	Yosualdus S. Mansyhu, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si		
16	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	Desa Oelita Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang	200,000,000	Yosualdus S. Mansyhu, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si		
17	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Nagekeo	Kelurahan Woloongo Kecamatan Boayae Kabupaten Nagekeo	200,000,000	Yosualdus S. Mansyhu, ST	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si		

as

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPK	NAMA KEPALA BIDANG	NAMA PENERIMA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
B. TAHUN ANGGARAN 2024							
1	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	Kelurahan Bakunase, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Pak Mub	
2	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Agape	
3	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kab. Kupang	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Bangkit	
4	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTS	Desa Nulle, Kecamatan Amunuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI		
5	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTU	Kel. Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelompok Pemuda Maju Berama	
6	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	Desa Tukumeno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kab. Belu	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Air Bersih	
7	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	Desa Neckasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kab. Belu	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	STM Nenuk	
8	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Timur	Desa Palaka Henbi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI		
9	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya	200.000.000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Poktan Ana Leko	
10	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sabu Raijua	Desa Tanajawa, Kecamatan Hawu Melhara, Kab. Sabu Raijua	200.000.000	Dominikus P. Kolin, ST.MM	Buce Fangidae, ST. MSI	SMA Negeri I Hawu Melhara	
11	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kab. Alor	200.000.000	Dominikus P. Kolin, ST.MM	Buce Fangidae, ST. MSI	Kampung Tronter	
12	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kab. Alor	200.000.000	Dominikus P. Kolin, ST.MM	Buce Fangidae, ST. MSI	Kampung Usakan	
13	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Alor	Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor	200.000.000	Dominikus P. Kolin, ST.MM	Buce Fangidae, ST. MSI	Mailelang Kang	
14	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Lembata	Desa Atakera, Kecamatan Wlandoni, Kab. Lembata	200.000.000	Dominikus P. Kolin, ST.MM	Buce Fangidae, ST. MSI	Pana Niku	
15	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	Desa Natanlage Timur, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo	200.000.000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Buce Fangidae, ST. MSI	Nagenai	
16	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	Desa Nagegoa, Kecamatan Boawae, Kab. Nagekeo	200.000.000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Buce Fangidae, ST. MSI	Lingkungan Paulewa Block D	
17	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	Desa Waebela, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada	200.000.000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Buce Fangidae, ST. MSI	Balai Penyutuban Pertanian Inerie	
18	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Timur	Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur	200.000.000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Buce Fangidae, ST. MSI	Kampung Wae Waru	
19	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai	Desa Wac Lengkas, Kecamatan Langke Renbong Kabupaten Manggarai	200.000.000	Ir. Frumensius A. Paju, ST M.Si	Buce Fangidae, ST. MSI		

0

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPK	NAMA KEPALA BIDANG	NAMA PENERIMA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	Desa Mbuti, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat	200,000,000	Ir. Frumenstius A. Paju, ST M.Si	Buce Fangidae, ST. MSI	Makmur Bersama	
21	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	Desa Mbuti, Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat	200,000,000	Ir. Frumenstius A. Paju, ST M.Si	Buce Fangidae, ST. MSI	Mboas Wae	
22	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Barat	Desa Siru Kecamatan Lembor, Kab. Manggarai Barat	200,000,000	Ir. Frumenstius A. Paju, ST M.Si	Buce Fangidae, ST. MSI	Kampung Siru	
C. TAHUN ANGGARAN 2023							
1	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Kupang	Desa Oenoni, Kecamatan Amarasi, Kab. Kupang	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Oenoni	
2	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Kupang	Desa Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Sulamu	
3	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Kupang	Desa Sunlili, Kecamatan Kupang Barat, Kab. Kupang	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Sumlili	
4	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Belu	Desa Tukuneno, Kecamatan Tasileto Barat, Kab. Belu	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Sinar Harapan	
5	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Sumba Barat Daya	Kel. Langa Lero, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Jalan Kalapatoro, Kel. Langa Lero	
6	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Sumba Barat Daya	Kel. Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Jalan Mata Air Weetabula Atas Oetjara ratoru sumu Yakobus Rasul	
7	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Alor	Desa Nialang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Dalawastiana	
8	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Alor	Desa Haleman, Kecamatan Pantar Tengah, Kab. Alor	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Masyarakat Ling Al	
9	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai Barat	Kel. Batu Cernin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Masyarakat Batu Cernin	
10	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	Desa Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kab. Manggarai Timur	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Masyarakat Dusun Gunung	
11	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Timur	Desa Gunung Baru, Kec. Kota Komba, Kab. Manggarai Timur	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Masyarakat Dusun Komba Tunda dan Sopang	
12	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	Desa Benteng Rampas, Kec. Poco Ranaka Timur, Kab. Manggarai Timur	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Masyarakat Kampung Paleng	
13	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Ngada	Desa Seso, Kecamatan Soa, Kab. Ngada	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Balai Penyuluh Pertanian	
14	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Ngada	Desa Tadakisa, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Desa Tadakisa	
15	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Nagekeo	Kel. Ubedolumolo, Kecamatan Bajiawa, Kab. Ngada	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Desa Ubedolumolo	
16	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Desa Waibao	
17	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. TTTU	Desa Bijaepasu, Kecamatan Mionamfo Tengah, Kab. TTTU	200,000,000	A.S Uumbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Bijaepasu	

8

NO.	NAMA KEGIATAN	LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PPK	NAMA KEPALA BIDANG	NAMA PENERIMA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
D. TAHUN ANGGARAN 2022							
1	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	Kelurahan Manutepen, Kecamatan Alak, Kota Kupang	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelurahan Manutepen (Semuel Puling)	
2	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Belu	Desa Manliten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	K WT Kabas Laran	
3	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Belu	Kelurahan Farukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelurahan Farukbot	
4	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Malaka	Desa Alas Uira, Kecamatan Kobalina Timur, Kabupaten Malaka	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelompok Morisfoun	
5	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Timur	Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Wainapu, Kabupaten Sumba Timur	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelurahan Hambala	
6	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sumba Barat Daya	Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Bengo Mopir	
7	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Sikka	Desa Korowuru, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Dusun Dilit	
8	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Nagekeo	Kelurahan Olaklic, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Dusun Wolowawo	
9	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Nagekeo	Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelurahan Natanage Timur	
10	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Manggarai	Desa Wae Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Gereja Paroki Sta. Maria Imaculata Wae Kajong	
11	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Barat	Desa Wutubaru, Kecamatan Masang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Desa Wutubaru	
12	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Lokasi B di Kab. Manggarai Barat	Desa Golo Ronggot, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Lengkong Wol	
13	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kab. Manggarai Timur	Desa Deno, Kecamatan Peco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelompok Mentari	
14	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kab. Manggarai Timur	Kampung Woloroka, Desa Bano, Kec. Kota Komba, Kab. Manggarai Timur	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Lotho Pure Dhupa	
15	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kab. Manggarai Timur	Kampung Purak, Desa Ngampang Mas, Kec.Borong Kab. Manggarai Timur	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Desa Ngampang Mas	
16	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi D di Kab. Manggarai Timur	Dusun Wolokolo, Kelurahan Kota Ndora, Kab. Manggarai Timur	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelurahan Kota Ndora	
17	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Flores Timur	Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Kelurahan Pohon Bao	
18	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kab. Ngada	Desa Radubata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada	200,000,000	A.S Umbu Dangu, ST.M.Ling	Buce Fangidae, ST. MSI	Desa Sambinasi Tengah	

2

